Kemendikdasmen

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN RAMAH

2026
KAJIAN SCHOOL KIT

Bagi Satuan Pendidikan terdampak Bencana Jenjang SMP







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
2026

Kemendikdasmen

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN RAMAH

2026

KAJIAN SCHOOL KIT

Bagi Satuan Pendidikan terdampak Bencana Jenjang SMP









Kata Sambutan

Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal

"Bantuan yang sampai kepada anak yang tepat, dalam bentuk yang benar-benar ia perlukan, dan pada saat ia membutuhkannya adalah capaian yang diharapkan."

Sesudah bencana, kembali ke sekolah kadang dimulai dari hal-hal yang tampak sederhana, sesederhana sebuah seragam yang layak, sepasang sepatu yang kokoh membawa murid berjalan, tas untuk membawa buku, atau alat tulis untuk kembali mencatat pelajaran. Bagi seorang murid yang baru kehilangan banyak hal karena bencana, perlengkapan sederhana itu menjadi tanda bahwa hidup mulai berjalan kembali.

Karena itu, pemulihan pendidikan tidak cukup hanya memastikan gedung sekolah dapat digunakan. Kita juga perlu melihat apa yang dibutuhkan setiap anak agar ia benar-benar siap kembali belajar. Kajian School Kit bagi Satuan Pendidikan Terdampak Bencana Jenjang SMP menempatkan murid sebagai penerima manfaat langsung dan menekankan bahwa bantuan harus ditentukan berdasarkan kondisi serta kebutuhan aktual, bukan diberikan dalam satu paket yang sama untuk semua.

Dampak bencana tidak pernah seragam. Ada murid yang kehilangan seluruh perlengkapannya, ada yang masih memiliki sebagian, dan ada pula yang membutuhkan ukuran atau jenis perlengkapan yang berbeda. Kajian ini karena itu mengarahkan pemenuhan School Kit agar berbasis kebutuhan, relevan dengan kegiatan pendidikan, proporsional, dan benar-benar bermanfaat bagi penerimanya.

Banyaknya jenis bantuan bukan ukuran utama, bantuan yang sampai kepada anak yang tepat, dalam bentuk yang benar-benar ia perlukan, dan pada saat ia membutuhkannya adalah capaian yang diharapkan. Ketepatan seperti inilah yang menjaga martabat penerima sekaligus memastikan setiap rupiah yang kita gunakan untuk pendidikan memberi manfaat yang nyata.

Saya berharap kajian ini membantu kita membangun cara kerja yang semakin peka terhadap keadaan murid. Sebab membesarkan pendidikan Indonesia juga berarti memastikan bahwa ketika seorang anak menghadapi masa paling sulit dalam hidupnya, negara tetap mampu berkata kepadanya "kamu tetap punya tempat untuk belajar, kamu tetap punya kesempatan untuk tumbuh, dan masa depanmu tetap layak diperjuangkan".

Jakarta, Mei 2026
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal

Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Kata Pengantar



Direktur Sekolah Menengah Pertama
Dr. Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen "Kajian Kebutuhan dan Rekomendasi Spesifikasi Teknis School kit bagi SMP Terdampak Bencana" ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun oleh Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas pada wilayah yang terdampak bencana.

Pemulihan pendidikan pascabencana tidak hanya mencakup rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga pemenuhan perlengkapan belajar yang mendukung murid untuk kembali mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, School kit menjadi salah satu bentuk bantuan yang penting karena berisi perlengkapan belajar yang dibutuhkan murid sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kajian ini disusun sebagai acuan dalam mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan spesifikasi teknis, serta menganalisis harga wajar setiap komponen School kit berdasarkan hasil survei dan kajian yang relevan. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar yang objektif dalam perencanaan dan penyediaan bantuan School kit secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, narasumber, pakar, serta berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat dalam mempercepat pemulihan layanan pendidikan bagi murid terdampak bencana serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Jakarta, Mei 2026
Direktur Sekolah Menengah Pertama,

Dr. Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A

TIM PENYUSUN

01 Pengarah

1. Dr. Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A. : Direktur Sekolah Menengah Pertama
2. Cepy Lukman Rusdiana, S.Kom., M.Si. : Kasubdit Sarana Prasarana dan Tata Kelola
3. Roelly Herdyanto, S.E., M.Si. : Kasubbag Tata Usaha
4. Hendro Sucipto, S.Kom. : PPK Digitalisasi

02 Penyusun

1. Taufik Sugih Hendayana, S.Kom.
2. Bambang Subeno, S.T., M.Kom.
3. Yustiandi, M.Pd.
4. Muhammad Ali, S.Kom.
5. Sari Narulita, S.Pd., M.T.
6. Dela Chaerani, S.Kom., M.Kom., M.Si
7. Iman Budiman, S.Kom.
8. Satria Ade Putra, S.Kom.
9. Siti Zaenab Sanusi, S.Pd.
10. Ahmad Sidik, S.Fil.I.
11. Wahyu Atmadi, S.Sos.
12.. Solehkun Kodir, S.Pd., M.T.

03 Penata Letak

Raafi Hasbi Assidiqi

Daftar Isi

Kata Sambutan i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar viii

1 **Bab 1 PENDAHULUAN**
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud Dan Tujuan 5
1.4 Ruang Lingkup 6
1.5 Metodologi 7

2 **Bab 2 LANDASAN KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN**
2.1 Pengertian *School kit* 10
2.2 *School kit* dalam Pemulihan Pendidikan Pascabencana 13
2.3 Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Murid Pascabencana 17
2.4 Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pendidikan 20
2.5 Kebijakan Bantuan Sosial Pascabencana 23
2.6 *School kit* dalam Pemulihan Layanan Pendidikan 26
2.7 Kerangka Konseptual Pemenuhan Kebutuhan Belajar Murid Pascabencana 29

3 **Bab 3 ANALISIS KEBUTUHAN *School kit***
3.1 Kondisi dan Kebutuhan Murid Terdampak Bencana 36
3.2 Identifikasi Kebutuhan *School kit* 38
3.3 Analisis Prioritas Kebutuhan 39
3.4 Analisis Penentuan Komponen *School kit* 41
3.41 Pakaian Seragam 41
3.42 Perlengkapan Berpakaian 42
3.43 Perlengkapan Belajar 44
3.5 Hasil Analisis Kebutuhan *School kit* 52

4 **Bab 4 ANALISIS DESAIN BANTUAN *School kit***
4.1 Analisis Desain Bantuan 56
4.2 Analisis Risiko dan Mitigasi 58
4.3 Hasil Analisis Desain *School kit* 60

5 **PENUTUP**
5.1. Rekomendasi..... 62

6 **DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN 1 : Format Data Satuan Pendidikan Dan Murid Terdampak Bencana..... 65
LAMPIRAN 2 : Format Identifikasi Kebutuhan Murid Terdampak Bencana.. 66
LAMPIRAN 3 : Matriks Analisis Dan Prioritas Kebutuhan *School kit*..... 68
LAMPIRAN 4 : Matriks Hasil Analisis Kebutuhan Dan Volume..... 70
LAMPIRAN 5 : Analisis Harga Dan Estimasi Kebutuhan Anggaran *School kit*..... 72

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tahapan Metodologi Kajian 7
Tabel 2.1 Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Murid Pascabencana 20
Tabel 3.1 Klasifikasi Kondisi Perlengkapan Murid Pascabencana 37
Tabel 3.2 Data Dasar Identifikasi Kebutuhan Murid 38
Tabel 3.3 Aspek Analisis Prioritas Kebutuhan *School kit* 40
Tabel 3.4 Matriks Analisis Penentuan Komponen *School kit* 46
Tabel 4.1 Analisis Desain Bantuan 57
Tabel 4.2 Analisis Risiko dan Mitigasi 58

.

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Alur Ruang Lingkup Kajian *School Kit* 6
Gambar 2.1 Kerangka Kerja Standar Minimum *EiE* 11
Gambar 2.2 Posisi *School Kit* dalam Pemulihan Pendidikan Pascabencana 16
Gambar 2.3 Alur Pelaporan, Penyaluran, dan Akuntabilitas Bantuan *School Kit* 25
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Pemenuhan Kebutuhan Belajar Murid Pascabencana .. 33



PENDAHULUAN

Bab 1

1.1 LATAR BELAKANG

Bencana dapat mengganggu keberlangsungan layanan pendidikan, baik melalui kerusakan sarana dan prasarana maupun hilang atau rusaknya perlengkapan yang digunakan murid untuk mengikuti pembelajaran. Dalam kondisi pascabencana, pemulihan pendidikan karena itu tidak hanya memerlukan pemulihan fasilitas satuan pendidikan, tetapi juga dukungan terhadap kebutuhan individual murid agar dapat kembali mengikuti proses pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan pendidikan perlu memperhatikan kesiapan satuan pendidikan sekaligus kebutuhan murid untuk kembali belajar sesuai dengan karakteristik dampak bencana yang terjadi.

Sebagai contoh, bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada 4.922 satuan pendidikan dan berimplikasi terhadap layanan pendidikan sekitar 707.161 murid serta aktivitas pembelajaran 59.620 guru dan tenaga kependidikan. Besarnya dampak tersebut menunjukkan perlunya upaya pemulihan yang memperhatikan kesiapan satuan pendidikan sekaligus kebutuhan murid untuk kembali belajar.

Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada murid terdampak adalah *School kit*, yaitu bantuan untuk memenuhi kebutuhan individual murid yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. *School kit* telah ditempatkan sebagai salah satu jenis Bantuan Sosial Pasca bencana untuk jenjang SMP. Namun, perencanaan *School kit* perlu didasarkan pada kebutuhan aktual karena dampak bencana dan kebutuhan setiap murid dapat berbeda.

Oleh karena itu, penentuan *School kit* perlu diawali dengan identifikasi kebutuhan murid untuk selanjutnya menentukan jenis perlengkapan yang diperlukan, penerima manfaat, jumlah kebutuhan, volume, serta kebutuhan anggaran. Pendekatan ini penting agar *School kit* tidak ditetapkan sebagai paket barang terlebih dahulu, tetapi merupakan hasil analisis terhadap kebutuhan murid terdampak.



Atas dasar tersebut, Kajian Bantuan Sosial Pascabencana Jenis *school kit* Jenjang SMP disusun untuk menghasilkan dasar analisis dan rekomendasi desain *school kit* yang berbasis kebutuhan, tepat sasaran, efisien, dan mendukung keberlanjutan pembelajaran pascabencana.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Kajian Bantuan Sosial Pascabencana Jenis *School kit* Jenjang SMP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan menjamin hak setiap murid untuk memperoleh layanan pendidikan.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, termasuk pemulihan berbagai sektor pembangunan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan
12. Kebijakan dan pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial Pascabencana di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015–2030 sebagai kerangka global dalam pengurangan risiko bencana yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan ketahanan masyarakat.
14. *INEE Minimum Standards for Education*: Preparedness, Response, Recovery (2024) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan pendidikan pada situasi darurat dan pascabencana.

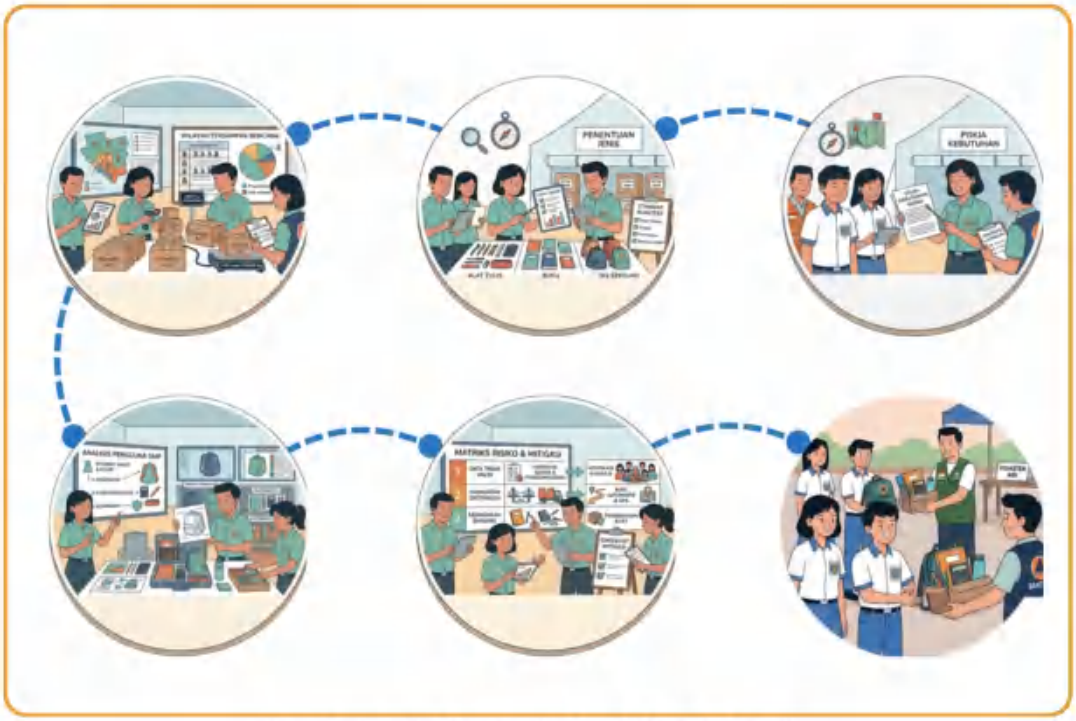
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Kajian Bantuan Sosial Pascabencana Jenis *School kit* Jenjang SMP dimaksudkan sebagai dasar analisis dalam penyusunan kebijakan pemberian bantuan sosial pascabencana berupa *School kit* bagi murid jenjang SMP yang terdampak bencana. Kajian ini diharapkan menjadi acuan dalam menentukan desain bantuan yang berbasis kebutuhan, tepat sasaran, efektif, efisien, serta mendukung keberlanjutan layanan pendidikan pada masa pemulihan pascabencana.

Adapun tujuan penyusunan kajian ini adalah:

1. mengidentifikasi kebutuhan murid terdampak bencana yang relevan untuk dipenuhi melalui *School kit*;
2. menganalisis jenis perlengkapan yang perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan murid;
3. menentukan sasaran penerima manfaat serta volume kebutuhan bantuan;
4. mengestimasi kebutuhan anggaran berdasarkan jenis perlengkapan, volume kebutuhan, dan kewajaran harga;
5. menyusun rekomendasi desain Bantuan Sosial Pascabencana jenis *School kit* yang efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran; serta
6. memberikan rekomendasi mekanisme penyaluran *School kit* yang mendukung percepatan pemulihan layanan pendidikan pascabencana.

1.3 RUANG LINGKUP



Gambar 1.1 Alur Ruang Lingkup Kajian *School Kit*

Kajian difokuskan pada substansi dan desain *School kit* bagi murid SMP terdampak bencana, meliputi:

1. identifikasi kebutuhan murid;
2. analisis dan penentuan jenis perlengkapan;
3. analisis penerima manfaat dan volume kebutuhan;
4. analisis desain bantuan; serta
5. analisis risiko dan mitigasi pelaksanaan.

Kajian tidak membahas kembali tata kelola umum Bantuan Sosial Pascabencana yang telah diatur dalam perangkat kebijakan dan panduan pelaksanaan.

1.5 METODOLOGI

Kajian menggunakan pendekatan analisis kebutuhan (*needs assessment*) dan analisis desain kebijakan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan murid terdampak, menentukan alternatif pemenuhan kebutuhan, menilai relevansi dan prioritas setiap alternatif, serta menghitung volume dan kebutuhan anggaran.

Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk membandingkan alternatif desain bantuan dengan mempertimbangkan ketepatan kebutuhan, efisiensi, kemudahan pelaksanaan, distribusi, dan risiko, sehingga diperoleh rekomendasi desain *School kit* yang paling sesuai.

Metodologi kajian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tahapan Metodologi Kajian

No.	Metode	Uraian
1	Telaah regulasi dan standar	Mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan, penanggulangan bencana, bantuan sosial, serta kebijakan pendidikan dalam situasi darurat. Telaah juga dilakukan terhadap standar dan pedoman internasional, antara lain *INEE Minimum Standards for Education* (2024), *Education Needs Assessment* Package (*Global Education Cluster*), *The Sphere Handbook* (2018), dan *UNICEF School-in-a-Box Guidelines*, sebagai dasar konseptual penyusunan desain *School kit*.
2	Pengumpulan data dampak bencana	Mengumpulkan data sekunder mengenai wilayah terdampak, jumlah satuan pendidikan, jumlah murid terdampak, karakteristik bencana, tingkat kerusakan, serta data pendukung lainnya yang diperoleh dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan sumber resmi lainnya.

No.	Metode	Uraian
3	Analisis kebutuhan murid (*needs assessment*)	Mengidentifikasi kebutuhan murid yang berkaitan dengan keberlangsungan proses pembelajaran, khususnya perlengkapan belajar yang hilang, rusak, atau tidak lagi dapat digunakan akibat bencana. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi aktual murid dengan kebutuhan minimal agar pembelajaran dapat kembali berlangsung secara optimal.
4	Analisis prioritas kebutuhan *School kit*	Menganalisis alternatif perlengkapan yang dapat dimasukkan ke dalam *School kit* berdasarkan tingkat urgensi, relevansi terhadap proses pembelajaran, jumlah penerima manfaat, kemudahan penggunaan, serta kesesuaiannya dengan karakteristik murid jenjang SMP. Tahap ini menghasilkan komponen *School kit* yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid terdampak.
5	Kajian teknis komponen *School kit*	Menelaah spesifikasi teknis setiap komponen *School kit* dengan mempertimbangkan aspek mutu, keamanan, daya tahan, serta kesesuaian terhadap standar nasional maupun spesifikasi teknis yang berlaku. Kajian ini bertujuan memastikan bahwa setiap komponen bantuan layak digunakan dan mendukung kegiatan pembelajaran.
6	Analisis penerima manfaat dan volume kebutuhan	Menentukan sasaran penerima bantuan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, menghitung volume kebutuhan setiap komponen *School kit*, dan spesifikasi barang.
7	Analisis desain	Menyusun dan membandingkan alternatif desain *School kit* dengan mempertimbangkan ketepatan sasaran, efektivitas pemenuhan kebutuhan murid, serta potensi risiko pelaksanaan. Analisis ini menghasilkan rekomendasi desain *School kit* yang paling sesuai untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan pascabencana.
8	Validasi hasil kajian	Memvalidasi hasil analisis dan rekomendasi melalui pembahasan bersama unit teknis, pemangku kepentingan terkait, serta penelaahan terhadap data dan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.



LANDASAN KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN

Bab 2

2.1 PENGERTIAN *SCHOOL KIT*

Bencana dan situasi kedaruratan dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan melalui berbagai bentuk, mulai dari tidak dapat digunakannya fasilitas pendidikan hingga berkurangnya kemampuan murid untuk mengakses dan mengikuti pembelajaran. Dalam kajian pendidikan, kondisi tersebut dibahas dalam kerangka *Education in Emergencies* (*EiE*). *EiE* berkembang sebagai bidang yang menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari respons terhadap krisis dan menekankan perlunya mempertahankan kesempatan belajar yang aman dan berkualitas selama maupun setelah kondisi darurat (Akkari & Radhouane, 2023). Pendidikan dalam konteks kedaruratan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pembukaan kembali sekolah, tetapi juga dengan berbagai kondisi yang memungkinkan murid tetap atau kembali terlibat dalam proses pendidikan.

Keberlanjutan pendidikan menjadi salah satu perhatian penting dalam penanganan dampak bencana. Studi Akram et al (2012) pada sekolah dasar terdampak bencana di Bangladesh menunjukkan bahwa intervensi pendidikan dalam situasi darurat dapat membantu sekolah mempertahankan keberlangsungan pendidikan ketika kondisi normal terganggu. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pendidikan membutuhkan respons yang secara khusus dirancang untuk mengurangi hambatan terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan. Sejalan dengan itu, Wheeler & Donovan (2022) menunjukkan bahwa program pendidikan pascabencana berperan dalam mendukung pemulihan murid, termasuk melalui penyediaan lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan aktivitas pendidikan setelah bencana.

Dalam kerangka tersebut, ketersediaan sumber daya pendidikan merupakan salah satu unsur yang mendukung keberlangsungan proses belajar. Bencana tidak hanya dapat mengganggu lingkungan fisik tempat pendidikan diselenggarakan, tetapi juga kondisi murid dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Literatur *EiE* menunjukkan bahwa respons pendidikan dalam situasi darurat perlu mempertimbangkan berbagai dimensi secara terpadu, termasuk akses terhadap pembelajaran, kualitas pendidikan, kondisi murid, kapasitas pendidik, serta sumber daya yang memungkinkan kegiatan pendidikan tetap berlangsung (Akkari & Radhouane, 2023).



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Standar Minimum *EiE*
Sumber: *INEE Minimum Standards Handbook* (2010)

Berdasarkan perspektif tersebut, pemenuhan perlengkapan individual murid dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap akses dan partisipasi dalam pendidikan pascabencana. Perlengkapan individual berbeda dari sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan secara kolektif oleh satuan pendidikan. Sarana dan prasarana mendukung kapasitas sekolah dalam menyelenggarakan layanan, sedangkan perlengkapan individual melekat pada kebutuhan murid dalam mengikuti kegiatan pendidikan. Pembedaan ini penting dalam kajian *School kit* karena menempatkan murid sebagai penerima manfaat langsung dan sekaligus menentukan batas intervensi yang dikaji.

Istilah *School kit* sendiri belum berkembang sebagai konstruk akademik dengan definisi dan komposisi yang bersifat universal. Literatur ilmiah mengenai pendidikan dalam situasi darurat lebih banyak menggunakan kerangka yang lebih luas, seperti *Education in Emergencies*, *educational continuity*, akses terhadap pendidikan, sumber daya pendidikan, serta pemulihan murid setelah bencana (Akkari & Radhouane, 2023; Akram et al., 2012; Wheeler & Donovan, 2022).

Oleh karena itu, pengertian *School kit* dalam kajian ini tidak diambil sebagai definisi baku dari satu artikel tertentu, melainkan dirumuskan secara operasional berdasarkan fungsi yang akan dipenuhi dalam konteks pemulihan pendidikan pascabencana.

Dalam konteks Bantuan Sosial Pascabencana jenjang SMP, *School kit* ditempatkan sebagai bantuan yang manfaatnya ditujukan secara langsung kepada murid terdampak. Berbeda dengan bantuan yang berorientasi pada pemulihan kapasitas satuan pendidikan, *School kit* diarahkan pada pemenuhan perlengkapan individual yang diperlukan murid dalam kegiatan pendidikan.

Panduan pelaksanaan yang menjadi konteks kajian ini juga menempatkan *School kit* sebagai salah satu jenis Bantuan Sosial Pascabencana bersama Ruang Kelas Darurat, meubelair, peralatan laboratorium IPA, peralatan laboratorium komputer, dan peralatan pendidikan lainnya.

Atas dasar sintesis tersebut, *School kit* dalam kajian ini didefinisikan sebagai seperangkat perlengkapan individual yang diberikan kepada murid terdampak bencana untuk membantu memenuhi kembali kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sehingga mendukung kesiapan murid untuk kembali mengakses, mengikuti, dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Definisi ini menempatkan *School kit* pada tingkat penerima manfaat individual (*learner level*) dan membedakannya dari intervensi yang ditujukan untuk memulihkan fasilitas maupun kapasitas satuan pendidikan.

Definisi tersebut menekankan tiga unsur utama.

Pertama, *School kit* berada dalam konteks pemulihan pendidikan pascabencana, sehingga keberadaannya berkaitan dengan dampak bencana terhadap keberlangsungan pendidikan.

Kedua, penerima manfaat langsungnya adalah murid terdampak, sehingga pemenuhannya berorientasi pada kebutuhan individual.

Ketiga, perlengkapan yang dipenuhi harus memiliki keterkaitan dengan kegiatan pendidikan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kesiapan murid untuk kembali mengikuti pembelajaran. Jenis, jumlah, dan spesifikasi perlengkapan tidak ditetapkan melalui definisi ini, tetapi ditentukan melalui proses analisis kebutuhan pada bagian selanjutnya. Dengan demikian, definisi *School kit* berfungsi sebagai batas konseptual, sedangkan komposisi bantuan merupakan hasil analisis.

2.2 *SCHOOL KIT* DALAM PEMULIHAN PENDIDIKAN PASCABENCANA



Bencana dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap keberlangsungan pendidikan. Dampak tersebut tidak hanya berupa kerusakan fisik pada bangunan dan fasilitas sekolah, tetapi juga dapat memengaruhi kehadiran, partisipasi, proses pembelajaran, dan capaian akademik murid. Kajian terhadap sekolah yang terdampak bencana menunjukkan bahwa pemulihan akademik sekolah setelah bencana dapat mengikuti lintasan yang berbeda dan berkaitan antara lain dengan tingkat kehadiran serta kondisi sosial ekonomi murid (Lai et al., 2019).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan merupakan proses yang lebih luas daripada sekadar mengembalikan kondisi fisik sekolah Kondisi serupa ditemukan dalam konteks Indonesia. Lassa et al. (2023), melalui kajian mengenai dampak banjir terhadap pendidikan, menunjukkan bahwa bencana dapat memengaruhi fasilitas sekolah sekaligus kualitas pembelajaran dan proses pemulihan pendidikan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya melihat dampak bencana terhadap pendidikan secara komprehensif karena kerusakan fasilitas, gangguan proses belajar, dan kapasitas pemulihan saling berhubungan. Dengan demikian, keberfungsian kembali bangunan dan fasilitas pendidikan merupakan bagian penting dari pemulihan, tetapi belum dengan sendirinya menggambarkan pulihnya keseluruhan proses pendidikan.

Dampak bencana terhadap pendidikan juga dapat berlangsung melampaui periode tanggap darurat. (Lai et al., 2019) menemukan adanya variasi lintasan pemulihan akademik pada sekolah-sekolah terdampak bencana, sedangkan penelitian mengenai bencana beruntun di Puerto Rico menunjukkan bahwa murid di wilayah yang terdampak berat atau mengalami penutupan sekolah permanen memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan capaian akademik dan, pada sebagian murid, putus sekolah setelah bencana. Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa pemulihan pendidikan perlu diarahkan pada keberlanjutan partisipasi dan proses belajar murid, bukan semata-mata pada normalisasi operasional satuan pendidikan.

Dalam kerangka *Education in Emergencies* (*EiE*), pendidikan pada masa dan setelah kondisi darurat memiliki fungsi penting dalam mempertahankan keberlangsungan proses pendidikan. Akram et al. (2012), melalui evaluasi program *EiE* pada 1.000 sekolah dasar di Bangladesh, menunjukkan bahwa intervensi yang dirancang untuk kondisi bencana dapat membantu sekolah mempertahankan kegiatan pendidikan ketika fasilitas normal tidak dapat digunakan. Studi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan layanan dengan kondisi yang muncul akibat bencana.

Pemulihan pendidikan pascabencana dengan demikian dapat dipahami berlangsung pada sekurang-kurangnya dua ranah yang saling berkaitan.

Ranah pertama adalah pemulihan kapasitas satuan pendidikan, yang berkaitan dengan kemampuan sekolah untuk kembali menyediakan layanan pendidikan, termasuk melalui pemulihan ruang belajar, fasilitas, peralatan, serta aspek pendukung penyelenggaraan pembelajaran.

Ranah kedua adalah pemulihan kesiapan murid, yaitu dukungan terhadap kondisi yang memungkinkan murid kembali mengakses, mengikuti, dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan.

Pembagian dua ranah tersebut merupakan kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ini untuk membedakan sasaran intervensi pada tingkat satuan pendidikan dan pada tingkat murid; bukan klasifikasi baku yang dinyatakan secara eksplisit oleh satu artikel tertentu.

Pembedaan tersebut penting karena pemulihan fasilitas sekolah tidak selalu menghilangkan seluruh hambatan yang dialami murid. Bencana dapat memengaruhi keluarga, kondisi sosial ekonomi, tempat tinggal, mobilitas, serta sumber daya yang tersedia bagi murid untuk mengikuti pendidikan. Lai et al. (2019), misalnya, menemukan bahwa proporsi murid yang secara ekonomi kurang beruntung berkaitan dengan lintasan pemulihan akademik sekolah setelah bencana. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas untuk pulih tidak selalu merata dan bahwa kondisi pada tingkat murid perlu diperhatikan bersama dengan pemulihan pada tingkat institusi pendidikan.

Dalam konteks inilah *School kit* ditempatkan sebagai salah satu bentuk dukungan pada ranah pemulihan kesiapan murid. *School kit* tidak dimaksudkan untuk menggantikan rehabilitasi sarana dan prasarana, pemulihan ruang pembelajaran, ataupun intervensi lain pada tingkat satuan pendidikan. Fungsinya bersifat melengkapi, yaitu membantu memulihkan ketersediaan perlengkapan individual yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ketika perlengkapan tersebut tidak lagi tersedia atau tidak dapat digunakan akibat bencana. Posisi ini konsisten dengan karakter *School kit* dalam kajian ini sebagai bantuan yang penerima manfaat langsungnya adalah murid.

Penempatan *School kit* pada tingkat murid juga perlu dipahami secara proporsional. Literatur yang ditelaah tidak menunjukkan bahwa pemberian *School kit* secara tersendiri merupakan faktor tunggal yang menentukan keberhasilan pemulihan pendidikan. Sebaliknya, penelitian tentang pemulihan pendidikan menunjukkan bahwa proses tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk keberfungsian sekolah, keberlanjutan layanan, kondisi sosial ekonomi, kehadiran murid, kapasitas pendidik, dan sumber daya yang tersedia (Lai et al., 2019; Lassa et al., 2023). Oleh karena itu, *School kit* lebih tepat diposisikan sebagai salah satu instrumen pendukung dalam sistem pemulihan pendidikan pascabencana.

Peran sekolah dalam proses pemulihan juga tidak terbatas pada penyelenggaraan kegiatan akademik. Wheeler & Donovan (2022), melalui kajian kasus pasca-Hurricane Maria di Puerto Rico, menunjukkan bahwa program pendidikan pascabencana dapat berkontribusi terhadap pemulihan murid dan bahwa guru serta institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung anak terdampak bencana.

Studi tersebut sekaligus menunjukkan perlunya sumber daya dan dukungan yang memadai agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung dalam konteks pascabencana. Dengan demikian, dukungan pada tingkat murid, termasuk pemenuhan kebutuhan individual yang berkaitan dengan pendidikan, perlu ditempatkan dalam ekosistem pemulihan yang lebih luas.

Secara konseptual, posisi *School kit* dalam pemulihan pendidikan pascabencana pada kajian ini dapat digambarkan sebagaimana Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Posisi *School Kit* dalam Pemulihan Pendidikan Pascabencana

Gambar 2.1 menunjukkan kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ini. Pemulihan kapasitas satuan pendidikan dan pemulihan kesiapan murid ditempatkan sebagai dua ranah yang saling melengkapi. Pemulihan pada tingkat satuan pendidikan memungkinkan layanan pendidikan kembali tersedia, sedangkan pemulihan pada tingkat murid mendukung kemampuan murid untuk kembali memanfaatkan dan berpartisipasi dalam layanan tersebut.

School kit berada pada ranah kedua sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kesiapan murid. Dengan demikian, dalam kajian ini *School kit* diposisikan sebagai instrumen pendukung pemulihan pendidikan pada tingkat individual murid yang melengkapi pemulihan kapasitas satuan pendidikan. Kontribusinya terutama diarahkan pada pengurangan hambatan material yang berkaitan dengan perlengkapan individu untuk mengikuti kegiatan pendidikan.

2.3 PRINSIP PEMENUHAN KEBUTUHAN MURID PASCABENCANA

Pemenuhan kebutuhan murid pascabencana perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pemulihan pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan akses dan partisipasi murid dalam pembelajaran. Bencana dapat menimbulkan dampak yang berbeda pada murid, keluarga, dan satuan pendidikan, sehingga proses pemulihan tidak selalu dapat dilakukan melalui intervensi yang seragam. Dalam konteks *Education in Emergencies* (*EiE*), respons pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, serta hambatan yang dihadapi murid dalam situasi krisis agar intervensi yang diberikan tetap relevan dengan konteks penerima manfaat (Akkari & Radhouane, 2023).

Kebutuhan untuk memperhatikan kondisi aktual penerima menjadi semakin penting karena dampak bencana terhadap pendidikan bersifat multidimensional. Studi Lassa et al. (2023) mengenai dampak banjir terhadap pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berpengaruh terhadap fasilitas sekolah, tetapi juga terhadap kualitas pembelajaran dan proses pemulihan pendidikan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi spesifik yang muncul setelah bencana dan tidak cukup hanya berorientasi pada pemulihan fisik satuan pendidikan. Dalam konteks *School kit*, hal ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan individual murid perlu ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pemulihan pendidikan.

Atas dasar tersebut, prinsip pertama yang digunakan dalam kajian ini adalah berbasis kebutuhan (*needs-based*). Prinsip ini menempatkan kondisi aktual murid setelah bencana sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan status murid sebagai bagian dari satuan pendidikan terdampak, tetapi berdasarkan adanya kesenjangan antara kondisi yang dimiliki murid setelah bencana dan kondisi yang diperlukan untuk kembali mengikuti kegiatan pendidikan. Pendekatan tersebut penting karena jenis dan tingkat kehilangan yang dialami murid dapat berbeda, sehingga kebutuhan terhadap dukungan pendidikan juga tidak selalu identik.

Pendekatan berbasis kebutuhan sekaligus menghindari asumsi bahwa seluruh murid terdampak memerlukan bentuk bantuan yang sama. Dalam kajian kemanusiaan, asesmen kebutuhan digunakan untuk memahami prioritas penerima dan menjadi dasar penentuan respons yang lebih sesuai. Penelitian mengenai asesmen kebutuhan pada populasi terdampak keadaan darurat menunjukkan bahwa pengukuran kebutuhan yang dirasakan penerima dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan informasi mengenai kebutuhan prioritas yang diperlukan untuk merancang respons. Dalam konteks *School kit*, prinsip tersebut diterjemahkan melalui identifikasi kondisi perlengkapan yang dimiliki murid dan kebutuhan yang muncul akibat bencana sebelum jenis serta jumlah bantuan ditetapkan.

Prinsip kedua adalah relevansi dengan kegiatan pendidikan. Tidak seluruh kebutuhan yang muncul setelah bencana merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi melalui intervensi pendidikan. *School kit* memiliki batas fungsi sebagai dukungan yang berkaitan dengan kesiapan murid untuk kembali mengikuti kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kebutuhan yang dipertimbangkan perlu mempunyai hubungan yang jelas dengan aktivitas murid dalam mengakses dan mengikuti pembelajaran. Prinsip relevansi ini penting agar *School kit* tidak berkembang menjadi instrumen pemenuhan seluruh kebutuhan rumah tangga pascabencana, tetapi tetap berada dalam ruang lingkup pemulihan pendidikan.

Prinsip ketiga adalah proporsionalitas. Pemenuhan kebutuhan perlu dilakukan dalam jenis dan jumlah yang wajar sesuai dengan karakteristik kebutuhan penerima. Proporsionalitas tidak selalu berarti bahwa seluruh murid menerima jenis dan jumlah barang yang identik. Dalam konteks pascabencana, keseragaman bantuan dapat menghasilkan ketidaksesuaian apabila kondisi aktual penerima berbeda.

Oleh karena itu, volume bantuan perlu mempertimbangkan jumlah murid yang terdampak serta tingkat kebutuhan yang wajar untuk mendukung kegiatan pendidikan. Proporsionalitas juga berkaitan dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Intervensi berupa barang tidak secara otomatis menghasilkan dampak pendidikan hanya karena barang tersebut diberikan. Bukti mengenai penyediaan seragam sekolah menunjukkan hasil yang beragam. Evans & Ngatia (2021), misalnya, menemukan bahwa pemberian seragam gratis di Kenya meningkatkan partisipasi sekolah dalam jangka pendek, meskipun dampak jangka panjangnya lebih terbatas.

> Prinsip keempat adalah berorientasi pada penerima manfaat (*learner-centred*). Murid ditempatkan sebagai penerima manfaat akhir, sehingga keberhasilan *School kit* tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Orientasi pada penerima manfaat mengarahkan perhatian pada apakah bantuan benar-benar menjangkau murid yang terdampak dan dapat digunakan untuk mendukung partisipasinya dalam kegiatan pendidikan. Perspektif ini konsisten dengan perkembangan *EiE* yang menempatkan kebutuhan murid dan konteks lokal sebagai unsur penting dalam perancangan respons pendidikan (Akkari & Radhouane, 2023).

Orientasi kepada murid juga relevan dengan karakter pemulihan pendidikan pascabencana yang tidak hanya berkaitan dengan pemulihan bangunan atau fasilitas. Lassa et al. (2023) menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan setelah banjir di Indonesia berkaitan dengan interaksi antara fasilitas, kualitas pembelajaran, dan kapasitas pemulihan. Dengan demikian, intervensi pada tingkat murid perlu dipandang sebagai bagian yang melengkapi pemulihan pada tingkat satuan pendidikan. *School kit* memperoleh relevansinya apabila perlengkapan yang diberikan benar-benar dapat digunakan oleh murid untuk mengurangi hambatan material dalam kembali mengikuti kegiatan pendidikan..

Keempat prinsip tersebut tidak berdiri sendiri. Pemenuhan yang berbasis kebutuhan memastikan bahwa intervensi berangkat dari kondisi aktual; relevansi memastikan bahwa kebutuhan yang dipenuhi memiliki keterkaitan dengan pendidikan; proporsionalitas memastikan bahwa bentuk dan jumlah bantuan sesuai dengan tingkat kebutuhan; sedangkan orientasi pada penerima manfaat memastikan bahwa keseluruhan proses tetap diarahkan pada kebermanfaatannya bagi murid. Hubungan antarprinsip tersebut dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Murid Pascabencana

Prinsip	Dasar Pertimbangan	Implikasi dalam *School kit*
Berbasis kebutuhan (*needs-based*)	Kondisi aktual dan kesenjangan kebutuhan murid pascabencana	Bantuan ditentukan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, bukan semata-mata berdasarkan status sebagai murid terdampak
Relevan dengan kegiatan pendidikan	Keterkaitan kebutuhan dengan akses dan partisipasi dalam pendidikan	Barang yang dipertimbangkan harus memiliki fungsi yang jelas dalam mendukung murid mengikuti kegiatan pendidikan
Proporsional	Tingkat kebutuhan dan kewajaran pemenuhan	Jenis dan jumlah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan aktual serta menghindari kekurangan maupun kelebihan pemenuhan
Berorientasi pada penerima manfaat	Kebermanfaatan pada tingkat murid	Keberhasilan bantuan dilihat dari keterjangkauan, kesesuaian, dan pemanfaatannya oleh murid

2.4 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMULIHAN PENDIDIKAN

Pemulihan pendidikan pascabencana merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus upaya menjamin keberlangsungan layanan pendidikan.

Secara nasional, kerangka tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan penanggulangan bencana sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan pada pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat serta pelayanan publik yang terdampak. Dalam konteks pendidikan, kerangka tersebut memberikan landasan bahwa terganggunya layanan pendidikan akibat bencana merupakan bagian dari dampak yang memerlukan penanganan dan pemulihan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Regulasi ini memperkuat pendekatan penanganan bencana yang dilakukan secara terencana pada setiap tahapan, termasuk pemenuhan kebutuhan pada kondisi darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana. Bagi sektor pendidikan, kerangka tersebut menjadi relevan karena pemulihan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik satuan pendidikan, tetapi juga dengan pemulihan kondisi yang memungkinkan layanan pendidikan kembali berjalan dan dapat diakses oleh murid.

Pada sektor pendidikan, kebijakan tersebut diterjemahkan secara lebih spesifik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Regulasi ini menempatkan penanggulangan dampak bencana sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan dan mencakup tiga tahapan, yaitu prabencana, penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana, dan pemulihan layanan pendidikan pascabencana. Salah satu tujuan Program SPAB adalah memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan terdampak serta memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan.

Aspek yang penting bagi kajian *School kit* adalah bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat didasarkan pada informasi mengenai dampak dan kebutuhan. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 mengatur pengumpulan informasi mengenai dampak bencana pada satuan pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat.

Informasi tersebut digunakan untuk melakukan kajian dampak bencana dan menentukan langkah penanggulangannya. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab melakukan kajian dampak dan kebutuhan serta mengoordinasikan bantuan sektor pendidikan dengan mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah bencana. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa bantuan pendidikan pascabencana perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, bukan semata-mata berdasarkan keseragaman paket bantuan.

Pada tahap pascabencana, kebijakan SPAB menempatkan pemulihan sebagai upaya untuk mengembalikan keberfungsian layanan pendidikan. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 mengatur pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, pemfungsian kembali sarana dan prasarana pembelajaran yang aman, pemulihan proses pembelajaran, serta dukungan psikososial bagi warga satuan pendidikan terdampak. Dengan demikian, pemulihan pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas daripada pemulihan fisik semata dan perlu diarahkan pada kondisi yang memungkinkan proses pendidikan kembali berlangsung.

Dalam pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana memberikan prinsip yang relevan. Regulasi tersebut mendefinisikan sarana sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran serta membedakannya menjadi bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Lebih lanjut, pemenuhan sarana harus disesuaikan dengan kebutuhan jenjang dan jenis pendidikan, mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan murid, serta memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas. Prinsip tersebut relevan dalam kajian *School kit*, terutama sebagai pertimbangan dalam menilai kesesuaian dan kelayakan perlengkapan yang diperuntukkan bagi murid.

Kebijakan tersebut selanjutnya memperoleh konteks operasional melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 mengenai penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana. Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa pembelajaran pada kondisi pascabencana dapat diselenggarakan secara adaptif sesuai dengan kondisi murid dan satuan pendidikan.

Satuan pendidikan juga dapat mengoptimalkan bahan belajar sesuai kondisi pascabencana dan ketersediaan sarana prasarana, sementara penyelenggaraan asesmen mempertimbangkan kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan pascabencana menuntut penyesuaian layanan terhadap kondisi aktual murid dan satuan pendidikan.

Berdasarkan kerangka kebijakan tersebut, penyediaan *School kit* dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pemulihan pendidikan pada tingkat murid, khususnya ketika bencana menyebabkan hilang, rusak, atau tidak tersedianya perlengkapan individual yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Pemenuhan *School kit* dengan demikian perlu berangkat dari kebutuhan yang teridentifikasi, relevan dengan kegiatan pendidikan, mempertimbangkan karakteristik murid, serta diarahkan untuk mendukung keberlangsungan akses dan partisipasi murid dalam pembelajaran.

2.5 KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL PASCABENCANA

Bantuan sosial pascabencana merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pemulihan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana. Dalam konteks pendidikan, bantuan pascabencana tidak hanya diarahkan pada pemulihan fasilitas yang mengalami kerusakan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan yang diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan dan partisipasi murid dalam pembelajaran dapat kembali berlangsung. Dengan demikian, bantuan sosial pascabencana perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pemulihan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan dampak dan kebutuhan yang teridentifikasi.

Dasar penyelenggaraan bantuan tersebut berkaitan erat dengan kerangka penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelgaraan Penanggulangan Bencana. Pada tahap pascabencana, penanganan diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan fungsi pelayanan publik dan kehidupan masyarakat terdampak. Dalam sektor pendidikan, kerangka tersebut memberikan dasar bagi dilaksanakannya intervensi pemulihan sesuai dengan dampak bencana terhadap satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan.

Secara lebih spesifik, Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana menegaskan pentingnya identifikasi dampak dan kebutuhan dalam penanganan sektor pendidikan. Informasi mengenai dampak bencana digunakan untuk melakukan kajian dampak dan menentukan langkah penanggulangannya. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab melakukan kajian dampak dan kebutuhan penanganan serta mengoordinasikan bantuan sektor pendidikan dengan mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah terdampak bencana. Kerangka tersebut menempatkan kebutuhan yang teridentifikasi sebagai dasar penentuan bantuan, sehingga jenis dan besaran dukungan perlu memiliki hubungan dengan kondisi aktual akibat bencana.

Dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial Pascabencana jenjang SMP, bantuan pada dasarnya dapat diarahkan pada sasaran pemulihan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dampak yang terjadi. Sebagian bantuan berorientasi pada pemulihan kemampuan satuan pendidikan dalam menyediakan layanan pembelajaran, misalnya melalui pemulihan ruang, perabot, atau peralatan pendidikan. Sementara itu, terdapat pula bantuan yang manfaat akhirnya diarahkan secara langsung kepada murid untuk mendukung kesiapan mereka kembali mengikuti kegiatan pendidikan. Pembedaan sasaran tersebut penting agar bentuk bantuan yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang hendak ditangani.

School kit berada pada kelompok bantuan yang manfaatnya ditujukan secara langsung kepada murid terdampak. Kedudukannya berbeda dari bantuan yang terutama berorientasi pada pemulihan aset atau fasilitas satuan pendidikan. Dalam kajian ini, *School kit* diarahkan pada pemenuhan perlengkapan individual murid yang hilang, rusak, atau tidak lagi tersedia akibat bencana dan diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, satuan pendidikan berperan penting dalam mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan murid sebagai calon penerima manfaat.

Karakter *School kit* sebagai bantuan individual juga berimplikasi terhadap pendekatan perencanaannya. Kebutuhan tidak cukup dihitung hanya berdasarkan jumlah seluruh murid pada satuan pendidikan terdampak, tetapi perlu memperhatikan jumlah murid yang terdampak serta jenis kebutuhan yang dialami.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 yang mengamanatkan satuan pendidikan untuk melaporkan dampak bencana dan kebutuhan satuan pendidikan serta mengidentifikasi murid, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdampak. Dengan demikian, data murid terdampak menjadi bagian penting dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan.



Gambar 2.3 Alur Pelaporan, Penyaluran, dan Akuntabilitas Bantuan *School Kit*

Pemenuhan *School kit* juga perlu mempertimbangkan kesesuaian perlengkapan dengan fungsi pendidikan dan karakteristik penerimanya. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana memberikan prinsip bahwa perlengkapan sebagai bagian dari sarana pendidikan berfungsi menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Sarana juga harus sesuai dengan kebutuhan jenjang dan jenis pendidikan, mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan murid, serta memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Prinsip tersebut memberikan rujukan normatif dalam menilai kelayakan perlengkapan yang akan dipenuhi melalui *School kit*.

Dalam pelaksanaannya, bantuan sosial pascabencana juga perlu memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat kebutuhan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ketepatan sasaran berkaitan dengan kesesuaian antara penerima bantuan dan murid yang terdampak; ketepatan kebutuhan berkaitan dengan kesesuaian antara barang yang diberikan dan kebutuhan aktual; sedangkan efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan kemampuan bantuan memberikan manfaat yang diperlukan dengan penggunaan sumber daya yang wajar.

Dalam konteks *School kit*, prinsip tersebut juga berarti bahwa nilai bantuan tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan komposisi paket. Nilai bantuan merupakan batas pembiayaan yang harus dikelola secara efisien, sedangkan penetapan jenis, jumlah, dan karakteristik barang perlu tetap didasarkan pada hasil analisis kebutuhan.

Pendekatan ini penting untuk menghindari kondisi ketika komponen bantuan ditentukan terlebih dahulu hanya untuk memenuhi nilai anggaran, tanpa mempertimbangkan relevansi dan kebutuhan penerima manfaat. Dengan demikian, kebijakan Bantuan Sosial Pascabencana menjadi kerangka yang menghubungkan dampak bencana, kebutuhan murid, perencanaan bantuan, dan pemulihan pendidikan. Dalam kerangka tersebut, *School kit* diposisikan sebagai bantuan individual bagi murid terdampak yang penetapannya perlu didasarkan pada data dan hasil analisis kebutuhan. Kajian kebutuhan selanjutnya berfungsi untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam penentuan kelompok kebutuhan, komponen perlengkapan, jumlah penerima, volume kebutuhan, serta spesifikasi barang yang layak untuk diadakan.

2.6 *SCHOOL KIT* DALAM PEMULIHAN LAYANAN PENDIDIKAN

Pemulihan layanan pendidikan pascabencana merupakan proses untuk mengembalikan keberfungsian pendidikan setelah terjadi gangguan akibat bencana. Pemulihan tersebut tidak hanya ditandai dengan dibukanya kembali satuan pendidikan, tetapi juga dengan tersedianya kondisi yang memungkinkan proses pembelajaran kembali berlangsung dan murid dapat kembali mengakses serta berpartisipasi dalam pendidikan. Penelitian mengenai dampak banjir terhadap sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa bencana dapat memengaruhi akses terhadap pendidikan, kualitas pembelajaran, serta fasilitas sekolah secara bersamaan. Oleh karena itu, penilaian kebutuhan pemulihan pendidikan perlu melihat dampak bencana terhadap sekolah secara menyeluruh, bukan hanya kerusakan infrastrukturnya (Lassa et al., 2023).

Pemulihan layanan pendidikan juga perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai dimensi yang saling berkaitan. Wheeler & Donovan (2022), melalui kajian terhadap program pendidikan pasca-bencana, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi pascabencana berkaitan dengan kondisi lingkungan pembelajaran, kapasitas murid untuk belajar, kesiapan pendidik, serta ketersediaan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan pendidikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan layanan pendidikan tidak cukup dilakukan melalui satu bentuk intervensi, tetapi membutuhkan dukungan yang menjangkau unsur penyelenggara layanan sekaligus murid sebagai penerima layanan.

Kajian yang lebih mutakhir mengenai strategi pemulihan pendidikan pascabencana juga menunjukkan pentingnya pendekatan yang terkoordinasi dan berorientasi pada kebutuhan komunitas pendidikan. Rendra & Nurdin (2025), melalui kajian sistematis mengenai strategi pemulihan pendidikan pascabencana, menempatkan pemulihan sekolah sebagai proses yang membutuhkan koordinasi berbagai bentuk dukungan untuk mengembalikan fungsi pendidikan dan memperkuat kapasitas sekolah dalam menghadapi kondisi pascabencana. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa pemulihan layanan pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi sekolah dan murid.

Dalam konteks tersebut, keberfungsian kembali satuan pendidikan belum selalu berarti bahwa seluruh hambatan murid untuk mengikuti pendidikan telah teratasi. Bencana dapat berdampak pada sumber daya yang tersedia bagi murid dan keluarganya, termasuk perlengkapan individu yang sebelumnya digunakan untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, selain pemulihan pada tingkat satuan pendidikan, diperlukan perhatian terhadap kondisi yang memungkinkan murid kembali memanfaatkan layanan pendidikan yang telah tersedia. Perspektif tersebut menjadi dasar penempatan *School kit* sebagai salah satu bentuk dukungan pada tingkat individual murid dalam kajian ini.

> *School kit* secara khusus diarahkan untuk membantu memenuhi kembali kebutuhan perlengkapan individual yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ketika perlengkapan tersebut hilang, rusak, atau tidak lagi tersedia akibat bencana. Dalam posisi tersebut, *School kit* tidak menggantikan rehabilitasi ruang kelas, penyediaan fasilitas pembelajaran, pemulihan proses pembelajaran, maupun dukungan psikososial. *School kit* melengkapinya dengan menangani salah satu jenis hambatan pada tingkat murid, yaitu hambatan material yang berkaitan dengan ketersediaan perlengkapan untuk mengikuti kegiatan pendidikan.

Pembedaan antara pemulihan layanan pada tingkat satuan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pada tingkat murid menjadi penting karena keduanya memiliki sasaran intervensi yang berbeda. Pemulihan ruang kelas, perabot, laboratorium, dan fasilitas lainnya ditujukan untuk mengembalikan kapasitas satuan pendidikan dalam menyediakan layanan. Sementara itu, *School kit* ditujukan secara langsung kepada murid agar perlengkapan individual yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dapat kembali tersedia. Kedua bentuk intervensi tersebut bersifat saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan layanan pendidikan.

Pentingnya menghubungkan intervensi pemulihan dengan kondisi murid juga terlihat dalam kajian pemulihan pembelajaran pascabencana di Indonesia. Fakhrurrozi & Dimyathi (2025), melalui penelitian pada sekolah pascabencana di Sulawesi Tengah, menunjukkan pentingnya pendekatan pemulihan yang menempatkan murid sebagai pusat proses pendidikan dan mempertimbangkan kondisi mereka setelah bencana. Temuan tersebut memperkuat bahwa pemulihan layanan pendidikan perlu memperhatikan bukan hanya kesiapan institusi, tetapi juga kesiapan murid untuk kembali menjalani proses pembelajaran.

Dalam konteks kebijakan nasional, pendekatan tersebut sejalan dengan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Regulasi tersebut menempatkan pemulihan proses pembelajaran dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana pembelajaran sebagai bagian dari pemulihan layanan pendidikan pascabencana. Pada saat yang sama, penanganan pendidikan dalam kondisi bencana didasarkan pada informasi mengenai dampak dan kebutuhan yang digunakan untuk menentukan langkah penanggulangannya. Dengan demikian, dukungan pemulihan idealnya tidak ditentukan hanya berdasarkan kategori bantuan, tetapi memiliki hubungan dengan kebutuhan yang muncul akibat bencana.

Kesesuaian bantuan dengan kondisi penerima menjadi semakin penting pada *School kit* karena manfaat bantuan diterima secara individual. Jenis perlengkapan yang diperlukan seorang murid tidak selalu identik dengan murid lainnya. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh jenis perlengkapan yang hilang atau rusak, karakteristik penerima, serta kondisi yang dihadapi setelah bencana. Oleh karena itu, *School kit* perlu dipandang sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan, bukan semata-mata sebagai paket barang dengan komposisi yang harus selalu seragam.

Dari sisi fungsi pendidikan, pemenuhan perlengkapan melalui *School kit* juga perlu memiliki keterkaitan dengan kegiatan pendidikan murid. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 menempatkan perlengkapan sebagai salah satu bagian dari sarana pendidikan dan mendefinisikannya sebagai benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran. .

Regulasi tersebut juga mengamanatkan agar sarana sesuai dengan kebutuhan jenjang pendidikan dan mengakomodasi karakteristik serta kebutuhan murid. Kerangka tersebut memberikan dasar bahwa penentuan perlengkapan dalam *School kit* perlu mempertimbangkan fungsi, kesesuaian, dan karakteristik penerimanya

Dengan demikian, hubungan *School kit* dengan pemulihan layanan pendidikan dapat dipahami melalui tiga tahapan. Pertama, bencana menyebabkan terganggunya pendidikan dan dapat mengurangi ketersediaan perlengkapan individual murid. Kedua, pemulihan layanan pendidikan mengembalikan kesempatan bagi murid untuk mengikuti pembelajaran. Ketiga, pemenuhan kebutuhan individual melalui *School kit* membantu mengurangi hambatan material agar murid dapat kembali memanfaatkan kesempatan belajar tersebut. Dalam hubungan ini, *School kit* bukan merupakan tujuan akhir pemulihan, tetapi instrumen pendukung untuk mempertemukan tersedianya kembali layanan pendidikan dengan kesiapan murid untuk berpartisipasi di dalamnya.

Oleh karena itu, keberhasilan pemenuhan *School kit* tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan jumlah paket yang diadakan atau disalurkan. Dari perspektif pemulihan layanan pendidikan, aspek yang lebih penting adalah kesesuaian antara kebutuhan murid dengan perlengkapan yang diterima serta kebermanfaatannya dalam mendukung aktivitas pendidikan.

2.7 KERANGKA KONSEPTUAL PEMENUHAN KEBUTUHAN BELAJAR MURID PASCABENCANA

Bencana Pemenuhan kebutuhan belajar murid pascabencana perlu ditempatkan dalam kerangka pemulihan pendidikan yang menghubungkan dampak bencana, kondisi murid, kebutuhan yang teridentifikasi, bentuk dukungan, dan keberlanjutan partisipasi dalam pendidikan. Bencana dapat menimbulkan gangguan terhadap pendidikan melalui berbagai jalur, termasuk kerusakan fasilitas, terhentinya proses pembelajaran, perubahan kondisi keluarga, serta berkurangnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan belajar. Dalam konteks di Indonesia, Lassa et al. (2023) menunjukkan bahwa dampak banjir terhadap pendidikan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur sekolah, tetapi juga dengan akses terhadap pendidikan, kualitas pembelajaran, dan proses pemulihan.



Temuan tersebut menunjukkan bahwa identifikasi kebutuhan pascabencana perlu melihat dampak pendidikan secara lebih komprehensif daripada sekadar kerusakan fisik satuan pendidikan.

Pemulihan pendidikan pada dasarnya juga melibatkan dua sisi yang saling berhubungan, yaitu kemampuan satuan pendidikan untuk kembali menyediakan layanan dan kemampuan murid untuk kembali memanfaatkan layanan tersebut. Pemulihan fasilitas fisik sekolah penting karena keberfungsian infrastruktur pendidikan berkontribusi terhadap proses pemulihan komunitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan (Opabola et al., 2023). Namun, pemulihan fasilitas saja belum menggambarkan keseluruhan pemulihan pendidikan karena murid dapat menghadapi kebutuhan akademik, psikologis, sosial, keluarga, dan material yang berbeda setelah mengalami situasi krisis.

Oleh karena itu, dalam kajian ini kebutuhan belajar murid pascabencana dipahami sebagai kesenjangan antara kondisi aktual murid setelah bencana dengan kondisi yang diperlukan agar murid dapat kembali mengakses, mengikuti, dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Pengertian tersebut menempatkan kebutuhan bukan sebagai daftar barang yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan sebagai kondisi yang perlu diidentifikasi berdasarkan dampak yang dialami murid. Dengan pendekatan ini, keberadaan suatu barang atau bentuk dukungan baru dapat dinyatakan sebagai kebutuhan apabila terdapat kesenjangan yang relevan dengan keberlangsungan kegiatan pendidikan.

Kerangka tersebut penting karena dampak bencana tidak selalu dialami secara seragam. Murid dapat mengalami bentuk dan tingkat dampak yang berbeda sesuai dengan lokasi, kondisi keluarga, kerusakan yang dialami, serta sumber daya yang masih tersedia setelah bencana. Studi mengenai relokasi sekolah setelah gempa Wenchuan, misalnya, menunjukkan bahwa penyesuaian murid dalam proses pemulihan memiliki dinamika tersendiri dan perlu dipahami pada tingkat penerima layanan pendidikan (Ng & Sim, 2015). Hal ini menguatkan pentingnya menempatkan kondisi murid sebagai salah satu unit analisis dalam perencanaan pemulihan pendidikan, selain kondisi satuan pendidikan.

Dalam kerangka konseptual kajian ini, proses pemenuhan kebutuhan dimulai dari identifikasi dampak bencana pada murid. Identifikasi tersebut diarahkan untuk mengetahui perubahan kondisi yang memiliki implikasi terhadap kemampuan murid mengikuti kegiatan pendidikan. Pada aspek material, misalnya, bencana dapat menyebabkan perlengkapan pendidikan yang sebelumnya dimiliki menjadi hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan. Kondisi tersebut belum secara otomatis menjadi dasar pemberian seluruh jenis perlengkapan, tetapi menjadi informasi awal untuk mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan pada setiap kelompok penerima.

Tahap berikutnya adalah identifikasi kebutuhan aktual. Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara kondisi yang dimiliki murid setelah bencana dan kondisi yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Pendekatan tersebut menghasilkan hubungan konseptual sederhana:

> Kebutuhan = Kondisi yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan – Kondisi yang masih tersedia setelah bencana

Persamaan tersebut bukan merupakan formula matematis untuk menghitung nilai bantuan, melainkan representasi konseptual untuk menunjukkan bahwa kebutuhan muncul karena terdapat kesenjangan. Apabila suatu perlengkapan masih tersedia dan layak digunakan, tidak terdapat kesenjangan yang perlu dipenuhi untuk komponen tersebut. Sebaliknya, apabila perlengkapan yang diperlukan hilang, rusak, tidak layak digunakan, atau tidak tersedia akibat bencana, terdapat kesenjangan yang dapat dipertimbangkan sebagai kebutuhan.Setelah kebutuhan teridentifikasi, diperlukan tahap penilaian relevansi kebutuhan terhadap pendidikan.

Tahap ini berfungsi untuk membatasi ruang lingkup intervensi. Bencana dapat menimbulkan berbagai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan individual, tetapi tidak seluruhnya merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi melalui bantuan sektor pendidikan. Dalam konteks *School kit*, kebutuhan yang dipertimbangkan adalah kebutuhan individual murid yang mempunyai keterkaitan yang jelas dengan aktivitas pendidikan. Dengan demikian, penilaian relevansi menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa bantuan tetap berada dalam tujuan pemulihan layanan pendidikan.

> Tahap selanjutnya adalah penentuan prioritas pemenuhan. Keterbatasan sumber daya menyebabkan tidak seluruh kebutuhan selalu dapat dipenuhi dalam jenis, jumlah, dan waktu yang sama. Oleh karena itu, kebutuhan perlu diprioritaskan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, keterkaitan dengan aktivitas pendidikan, jumlah murid yang terdampak, karakteristik penerima, dan sumber daya yang tersedia. Prinsip tersebut sejalan dengan temuan mengenai pemulihan infrastruktur pendidikan yang menunjukkan pentingnya penetapan prioritas dan pengelolaan sumber daya secara efektif dalam proses pemulihan sekolah pascabencana (Opabola et al., 2023).

Dalam konteks *School kit*, hasil identifikasi dan prioritas kebutuhan kemudian diterjemahkan menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan. Pada tahap inilah jenis perlengkapan, jumlah, karakteristik, dan calon penerima ditetapkan. Dengan demikian, daftar komponen *School kit* merupakan hasil dari proses analisis kebutuhan, bukan titik awal analisis.

> Pemenuhan kebutuhan juga perlu mempertimbangkan bahwa pemulihan pendidikan bersifat multidimensional. Wheeler & Donovan (2022) menunjukkan bahwa program pendidikan setelah bencana berhadapan dengan dampak terhadap lingkungan fisik pembelajaran dan kapasitas belajar murid, sekaligus kebutuhan akan sumber daya, dukungan, dan kesiapan pendidik. Oleh karena itu, *School kit* tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap pemulihan fasilitas, proses pembelajaran, dukungan psikososial, maupun bentuk dukungan lainnya. *School kit* hanya menangani bagian tertentu dari kebutuhan pemulihan, yaitu kebutuhan material individual yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.

Kerangka konseptual tersebut juga sejalan dengan pendekatan kebijakan nasional. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 mengatur pengumpulan informasi mengenai dampak bencana dan kebutuhan penanganan darurat sebagai dasar untuk melakukan kajian dampak serta menentukan langkah penanggulangan. Satuan pendidikan juga memiliki peran dalam mengidentifikasi murid yang terdampak dan melaporkan kebutuhan yang muncul. Dengan demikian, identifikasi dampak dan kebutuhan merupakan bagian yang mendahului penentuan bentuk intervensi pendidikan pascabencana.

Secara konseptual, pemenuhan kebutuhan belajar murid pascabencana dalam kajian ini disusun sebagai suatu rangkaian yang dimulai dari identifikasi dampak bencana pada murid, dilanjutkan dengan identifikasi dan penilaian kebutuhan, hingga penentuan bentuk pemenuhan yang sesuai. Kerangka tersebut menempatkan *School kit* sebagai hasil dari proses analisis kebutuhan, bukan sebagai paket barang yang ditetapkan terlebih dahulu. Hubungan antarunsur tersebut disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Pemenuhan Kebutuhan Belajar Murid Pascabencana
Sumber: Diolah untuk keperluan kajian (2025)

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pemenuhan *School kit* tidak dimulai dari penetapan daftar barang, tetapi dari identifikasi dampak bencana terhadap kondisi murid. Dampak tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual murid pascabencana dan kondisi yang diperlukan untuk kembali mengikuti kegiatan pendidikan.

Kebutuhan yang teridentifikasi selanjutnya dinilai berdasarkan relevansinya terhadap kegiatan pendidikan dan diprioritaskan sebagai dasar penentuan bentuk pemenuhan.

Hasil proses tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam penentuan jenis, jumlah, dan karakteristik perlengkapan yang akan dipenuhi melalui *School kit*. Dengan demikian, komponen *School kit* merupakan hasil analisis kebutuhan, bukan titik awal proses perencanaan. Pendekatan tersebut memastikan bahwa bantuan yang diberikan memiliki keterkaitan dengan kondisi aktual dan kebutuhan murid terdampak bencana.

Pemenuhan *School kit* selanjutnya diarahkan untuk membantu mengurangi hambatan material yang dapat memengaruhi kesiapan murid mengikuti kegiatan pendidikan. Dalam kerangka ini, *School kit* tidak diposisikan sebagai satu-satunya instrumen pemulihan pendidikan, tetapi sebagai salah satu bentuk dukungan pada tingkat individual murid yang melengkapi pemulihan layanan pada tingkat satuan pendidikan.

Keseluruhan proses dilandasi oleh prinsip berbasis kebutuhan, relevan, proporsional, dan berorientasi pada murid. Prinsip berbasis kebutuhan memastikan bahwa pemenuhan berangkat dari kondisi aktual penerima; relevansi memastikan bahwa perlengkapan memiliki keterkaitan dengan kegiatan pendidikan; proporsionalitas memastikan bahwa jenis dan jumlah bantuan sesuai dengan tingkat kebutuhan; sedangkan orientasi pada murid memastikan bahwa manfaat akhir pemenuhan diarahkan pada kesiapan murid untuk kembali berpartisipasi dalam pendidikan.



ANALISIS KEBUTUHAN

School kit

Bab 3

3.1 KONDISI DAN KEBUTUHAN MURID TERDAMPAK BENCANA

Analisis kebutuhan *School kit* diawali dengan identifikasi kondisi murid pada satuan pendidikan yang terdampak bencana. Identifikasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai jumlah murid yang membutuhkan bantuan, kondisi perlengkapan yang dimiliki setelah bencana, serta kebutuhan perlengkapan yang perlu dipenuhi untuk mendukung kegiatan pendidikan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan sasaran, jenis kebutuhan, dan volume bantuan *School kit*.

Penetapan kebutuhan dilakukan pada tingkat murid karena dampak bencana terhadap perlengkapan individual tidak selalu sama. Pada satu satuan pendidikan yang sama, sebagian murid dapat mengalami kehilangan seluruh perlengkapan, sebagian mengalami kerusakan pada beberapa jenis perlengkapan, sedangkan sebagian lainnya masih memiliki perlengkapan yang dapat digunakan. Oleh karena itu, jumlah murid pada satuan pendidikan terdampak tidak secara otomatis sama dengan jumlah kebutuhan untuk setiap komponen *School kit*.

Identifikasi kondisi perlengkapan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dan kelayakan penggunaan barang.

Perlengkapan yang masih tersedia dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya tidak menjadi prioritas untuk dipenuhi kembali.

Sebaliknya, perlengkapan yang hilang, tidak tersedia, atau mengalami kerusakan sehingga tidak lagi layak digunakan dapat dicatat sebagai kebutuhan.

Untuk komponen tertentu, identifikasi juga perlu mempertimbangkan karakteristik murid yang memengaruhi kesesuaian barang, terutama jenis kelamin dan ukuran pakaian.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang menempatkan informasi mengenai dampak dan kebutuhan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan sektor pendidikan. Satuan pendidikan juga memiliki peran dalam mengidentifikasi murid yang terdampak dan melaporkan kebutuhan yang muncul akibat bencana. Dengan demikian, data kondisi aktual murid menjadi dasar penting dalam penetapan kebutuhan bantuan pendidikan pascabencana. Untuk kepentingan analisis, kondisi perlengkapan murid dapat diklasifikasikan sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Klasifikasi Kondisi Perlengkapan Murid Pascabencana

Kondisi Perlengkapan	Kriteria	Implikasi terhadap Pemenuhan
Tersedia dan layak digunakan	Barang masih dimiliki dan dapat digunakan sesuai fungsinya	Tidak menjadi prioritas pemenuhan
Tersedia tetapi tidak layak digunakan	Barang masih tersedia, tetapi mengalami kerusakan yang mengganggu fungsi atau kelayakan penggunaan	Dipertimbangkan sebagai kebutuhan
Hilang/tidak tersedia	Barang tidak lagi dimiliki atau tidak tersedia setelah bencana	Dipertimbangkan sebagai kebutuhan
Memerlukan penyesuaian	Barang yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan karakteristik murid	Dipenuhi sesuai kebutuhan dan karakteristik penerima

Klasifikasi tersebut digunakan sebagai instrumen analisis untuk membedakan antara barang yang masih dapat digunakan dan barang yang perlu dipenuhi kembali. Penetapan kebutuhan selanjutnya mempertimbangkan relevansi barang terhadap kegiatan pendidikan dan kesesuaiannya dengan ruang lingkup bantuan *School kit.* Dengan demikian, tidak seluruh barang yang hilang atau rusak akibat bencana secara otomatis menjadi komponen bantuan.

Selain kondisi perlengkapan, analisis membutuhkan data penerima yang memadai agar kebutuhan dapat dihitung secara tepat. Data yang diperlukan sekurang-kurangnya meliputi jumlah murid terdampak, daftar calon penerima, jenis kebutuhan, kondisi perlengkapan, serta karakteristik penerima yang berpengaruh terhadap jenis atau spesifikasi barang. Data mengenai bantuan sejenis yang telah diterima juga diperlukan untuk menghindari duplikasi pemenuhan kebutuhan

Tabel 3.2 Data Dasar Identifikasi Kebutuhan Murid

No.	Data	Kegunaan
1	Satuan pendidikan terdampak	Menentukan lokasi dan cakupan sasaran
2	Jumlah murid terdampak	Menentukan jumlah calon penerima
3	Daftar nominatif murid	Memastikan keterlacakan penerima
4	Kondisi perlengkapan	Menentukan barang yang masih layak, rusak, atau tidak tersedia
5	Jenis kebutuhan	Menentukan perlengkapan yang perlu dipenuhi
6	Jenis kelamin dan ukuran yang diperlukan	Menentukan kesesuaian komponen tertentu, khususnya pakaian
7	Bantuan sejenis yang telah diterima	Menghindari duplikasi bantuan

3.2 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN *SCHOOL KIT*

Identifikasi kebutuhan *School kit* dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan individual murid terdampak bencana yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Identifikasi dilakukan pada tingkat murid karena kondisi dan kebutuhan setiap penerima dapat berbeda.

Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan jenis perlengkapan yang terdampak maupun karakteristik penerima. Oleh karena itu, kebutuhan tidak ditentukan berdasarkan asumsi bahwa seluruh murid terdampak memerlukan jenis dan jumlah perlengkapan yang sama, tetapi berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi pada masing-masing penerima.

Untuk memudahkan pemetaan, kebutuhan yang teridentifikasi dikelompokkan berdasarkan fungsi penggunaannya menjadi tiga kelompok, yaitu pakaian seragam, perlengkapan berpakaian, dan perlengkapan belajar. Pakaian seragam mencakup kebutuhan pakaian yang digunakan murid sesuai dengan ketentuan seragam sekolah. Perlengkapan berpakaian mencakup atribut dan perlengkapan pendukung yang digunakan bersama pakaian seragam. Adapun perlengkapan belajar mencakup perlengkapan individual yang digunakan murid untuk mendukung kegiatan belajar. Pada jenis kebutuhan yang memerlukan penyesuaian individual, identifikasi juga memperhatikan karakteristik penerima yang menentukan kesesuaian perlengkapan. Kebutuhan pakaian seragam, misalnya, perlu diidentifikasi berdasarkan jenis pakaian dan ukuran yang diperlukan, sedangkan kebutuhan sepatu perlu dilengkapi dengan informasi ukuran sepatu.

3.3 ANALISIS PRIORITAS KEBUTUHAN

Hasil identifikasi kebutuhan menunjukkan bahwa kebutuhan murid terdampak bencana dapat memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan analisis prioritas untuk menentukan kebutuhan yang perlu didahulukan pemenuhannya melalui Bantuan Sosial Pascabencana jenis *School kit*. Analisis prioritas dilakukan agar bantuan diarahkan pada kebutuhan yang paling relevan dengan kegiatan pendidikan dan memberikan manfaat bagi murid dalam mendukung keberlanjutan aktivitas pendidikan pascabencana.

Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap kegiatan pendidikan, tingkat urgensi, kesenjangan ketersediaan, kebermanfaatan bagi murid, serta kelayakan pemenuhan melalui *School kit*. Kelima aspek tersebut digunakan sebagai kerangka pertimbangan untuk menilai kebutuhan yang telah teridentifikasi sebelum diterjemahkan menjadi komponen perlengkapan.

Tabel 3.3 Aspek Analisis Prioritas Kebutuhan *School kit*

Aspek Analisis	Pertanyaan Utama
Relevansi	Apakah kebutuhan berkaitan dengan kegiatan murid dalam mengikuti pendidikan?
Urgensi	Apakah kebutuhan perlu segera dipenuhi dalam masa pemulihan pascabencana?
Kesenjangan	Apakah perlengkapan yang dibutuhkan tidak tersedia, hilang, rusak, atau tidak lagi layak digunakan oleh murid?
Kebermanfaatan	Apakah pemenuhan kebutuhan memberikan manfaat langsung dalam mendukung kesiapan dan partisipasi murid dalam kegiatan pendidikan?
Kelayakan	Apakah kebutuhan tersebut sesuai untuk dipenuhi melalui Bantuan Sosial Pascabencana jenis *School kit*?

Kelima aspek tersebut dipertimbangkan secara terpadu dan tidak dimaksudkan sebagai sistem pembobotan atau pemberian skor numerik. Suatu kebutuhan memperoleh prioritas lebih tinggi apabila memiliki relevansi yang kuat terhadap kegiatan pendidikan, dibutuhkan segera dalam kondisi pascabencana, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan perlengkapan pada murid, memberikan manfaat langsung kepada penerima, serta layak dipenuhi melalui *School kit*.

Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan dikelompokkan menjadi prioritas utama, prioritas pendukung, dan tidak diprioritaskan. Prioritas utama merupakan kebutuhan yang memiliki tingkat relevansi, urgensi, kesenjangan, kebermanfaatan, dan kelayakan yang kuat. Prioritas pendukung merupakan kebutuhan yang tetap relevan dan bermanfaat, tetapi pemenuhannya dapat disesuaikan dengan kondisi penerima dan ketersediaan sumber daya. Adapun kebutuhan yang tidak memenuhi pertimbangan utama atau tidak sesuai dengan ruang lingkup *School kit* ditempatkan sebagai kebutuhan yang tidak diprioritaskan melalui mekanisme bantuan ini.

3.4 ANALISIS PENENTUAN KOMPONEN *SCHOOL KIT*

Analisis penentuan komponen *School kit* dilakukan untuk menerjemahkan kebutuhan yang telah teridentifikasi dan diprioritaskan menjadi jenis perlengkapan yang dapat dipenuhi melalui Bantuan Sosial Pascabencana. Pada tahap ini, analisis diarahkan pada kesesuaian antara kebutuhan murid dengan fungsi setiap jenis perlengkapan sehingga komponen yang direkomendasikan memiliki dasar kebutuhan yang jelas.

Penentuan komponen tidak didasarkan pada pembentukan paket barang yang seragam bagi seluruh murid. Setiap jenis perlengkapan dianalisis berdasarkan fungsi yang dipenuhi, karakteristik penggunaannya, serta kesesuaiannya sebagai perlengkapan individual murid. Pendekatan tersebut penting karena satu kebutuhan dapat memerlukan jenis perlengkapan tertentu, sementara kebutuhan lainnya dapat dipenuhi melalui komponen yang berbeda. Selain itu, beberapa komponen memerlukan penyesuaian berdasarkan karakteristik penerima, sedangkan komponen lainnya dapat digunakan secara umum.

Berdasarkan fungsi penggunaannya, komponen yang dianalisis dalam kajian ini dikelompokkan menjadi pakaian seragam, perlengkapan berpakaian, dan perlengkapan belajar. Analisis terhadap masing-masing kelompok dilakukan untuk menjelaskan fungsi kebutuhan yang dipenuhi serta dasar penetapan jenis perlengkapan sebelum dituangkan dalam matriks penentuan komponen *School kit*.

3.4.1 Pakaian Seragam

Pakaian seragam merupakan perlengkapan individual yang digunakan murid dalam mengikuti kegiatan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam konteks pemulihan pascabencana, kebutuhan terhadap pakaian seragam muncul apabila pakaian yang sebelumnya dimiliki murid hilang, rusak, atau tidak lagi layak digunakan. Oleh karena itu, pakaian seragam dipertimbangkan sebagai komponen *School kit* untuk memenuhi kebutuhan murid yang berdasarkan hasil identifikasi memerlukan penggantian pakaian seragam.

Penentuan pakaian seragam sebagai komponen *School kit* tidak dimaksudkan untuk memberikan seluruh jenis seragam kepada setiap murid secara otomatis. Pemenuhannya didasarkan pada kebutuhan aktual penerima. Murid yang masih memiliki pakaian seragam dalam kondisi layak tidak menjadi sasaran pemenuhan untuk jenis pakaian tersebut, sedangkan murid yang kehilangan atau tidak lagi memiliki pakaian seragam yang layak dapat dipertimbangkan sebagai penerima sesuai hasil identifikasi kebutuhan.

Jenis pakaian seragam juga perlu dibedakan berdasarkan penggunaannya. Dalam kajian ini, kebutuhan pakaian seragam mencakup seragam sekolah dan seragam Pramuka dengan jenis pakaian yang disesuaikan bagi murid putra dan putri. Pemisahan tersebut diperlukan karena setiap jenis pakaian memiliki karakteristik dan penerima yang berbeda. Penentuan jumlah masing-masing jenis pakaian karenanya tidak dapat hanya menggunakan jumlah keseluruhan murid terdampak, tetapi perlu mengacu pada jumlah murid yang membutuhkan setiap jenis pakaian. Pakaian seragam juga merupakan komponen yang memerlukan penyesuaian ukuran. Dengan demikian, analisis kebutuhan pakaian seragam sekurang-kurangnya perlu menghasilkan informasi mengenai jenis pakaian yang dibutuhkan, jumlah murid yang terdampak, serta ukuran pakaian masing-masing penerima.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pakaian seragam dapat direkomendasikan sebagai bagian dari *School kit* sepanjang kebutuhan tersebut teridentifikasi pada murid terdampak. Jenis dan jumlah yang dipenuhi selanjutnya ditentukan berdasarkan data kebutuhan penerima dan tidak ditetapkan sebagai jumlah yang sama untuk seluruh murid.

3.4.2 Perlengkapan Berpakaian

Perlengkapan berpakaian merupakan perlengkapan individual yang digunakan untuk melengkapi pakaian seragam murid dalam mengikuti kegiatan pendidikan di satuan pendidikan. Kelompok ini dibedakan dari pakaian seragam karena tidak berfungsi sebagai pakaian utama, tetapi melengkapi penggunaannya.

Dalam konteks pemulihan pascabencana, kebutuhan terhadap perlengkapan berpakaian muncul ketika perlengkapan yang sebelumnya dimiliki murid hilang, rusak, tidak tersedia, atau tidak lagi layak digunakan.

Berdasarkan fungsi tersebut, perlengkapan berpakaian dapat mencakup berbagai komponen yang penggunaannya berkaitan dengan jenis pakaian seragam. Topi dan dasi SMP digunakan sebagai kelengkapan pakaian seragam sekolah, sedangkan topi Pramuka, kacu Pramuka, dan ring kacu Pramuka digunakan sebagai kelengkapan pakaian seragam Pramuka. Sementara itu, ikat pinggang dan kaus kaki merupakan perlengkapan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan berpakaian murid sesuai dengan pakaian seragam yang dikenakan. Perbedaan fungsi dan penggunaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan setiap komponen perlu ditentukan berdasarkan kondisi aktual perlengkapan masing-masing murid.

Selain komponen tersebut, sepatu sekolah dapat dipertimbangkan dalam kelompok perlengkapan berpakaian karena merupakan alas kaki individual yang digunakan murid dalam mengikuti kegiatan di satuan pendidikan. Karakteristik sepatu juga menunjukkan bahwa beberapa komponen perlengkapan berpakaian tidak dapat dipenuhi secara seragam. Sepatu memerlukan penyesuaian ukuran agar dapat digunakan secara layak oleh penerima. Prinsip yang sama berlaku pada komponen lain apabila memiliki variasi ukuran atau karakteristik penggunaan tertentu. Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan perlengkapan berpakaian perlu menghasilkan informasi yang cukup mengenai jenis perlengkapan yang dibutuhkan, jumlah penerima, dan karakteristik barang yang perlu disesuaikan.

Adanya variasi tersebut berimplikasi pada penentuan jumlah setiap komponen. Jumlah kebutuhan topi, dasi, kaus kaki, sepatu, maupun perlengkapan lainnya tidak secara otomatis sama dengan jumlah keseluruhan murid terdampak. Jumlah masing-masing komponen ditentukan berdasarkan jumlah murid yang berdasarkan hasil identifikasi memang membutuhkan perlengkapan tersebut. Dengan pendekatan ini, pemenuhan perlengkapan berpakaian tidak diarahkan sebagai satu paket yang sama bagi seluruh penerima, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan aktual murid.

3.4.3 Perlengkapan Belajar

Perlengkapan belajar merupakan salah satu kebutuhan individual murid yang menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dalam konteks pemulihan pendidikan pascabencana, kebutuhan terhadap perlengkapan belajar menjadi relevan ketika perlengkapan yang sebelumnya dimiliki murid hilang, rusak, tidak tersedia, atau tidak lagi layak digunakan. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mempertimbangkan pemenuhan kembali perlengkapan yang diperlukan agar murid dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara memadai.

Penentuan jenis perlengkapan belajar didasarkan pada fungsi dan penggunaannya dalam aktivitas pembelajaran. Secara umum, kebutuhan tersebut mencakup perlengkapan untuk membawa dan menyimpan perlengkapan belajar, mencatat dan mengerjakan tugas, melakukan kegiatan menulis dan menggambar, serta menunjang penggunaan alat tulis. Pendekatan berdasarkan fungsi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap komponen yang direkomendasikan memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan murid dan tidak semata-mata ditetapkan berdasarkan kelaziman suatu paket perlengkapan sekolah.

Kebutuhan untuk membawa dan menyimpan perlengkapan belajar dapat dipenuhi melalui tas sekolah sebagai sarana untuk membawa dan melindungi buku serta perlengkapan individual lainnya. Dalam fungsi penyimpanan yang lebih spesifik, pouch alat tulis dapat digunakan untuk mengorganisasi alat tulis agar tersimpan dan mudah digunakan. Meskipun keduanya memiliki fungsi penyimpanan, cakupan penggunaannya berbeda sehingga penetapan masing-masing komponen tetap mempertimbangkan kebutuhan aktual murid dan tingkat prioritas pemenuhannya.

Kebutuhan terhadap media untuk mencatat, mengerjakan latihan, dan menyelesaikan tugas dapat dipenuhi melalui buku tulis. Penggunaan buku tulis mencakup berbagai kegiatan dan mata pelajaran sehingga memiliki fungsi yang luas dalam mendukung aktivitas pembelajaran. Karakteristiknya sebagai barang yang digunakan secara berulang dan dapat habis dalam periode tertentu juga perlu diperhatikan dalam menentukan kebutuhan per penerima.



Aktivitas pembelajaran tertulis selanjutnya memerlukan alat tulis individual, antara lain pensil dan balpoin. Pensil dapat digunakan untuk kegiatan menulis, menggambar, membuat sketsa, maupun kegiatan lain yang memerlukan kemungkinan koreksi, sedangkan balpoin digunakan untuk kegiatan pencatatan dan pengerjaan tugas tertulis. Kedua komponen tersebut memiliki fungsi penggunaan yang saling melengkapi dalam mendukung aktivitas belajar murid.

Keberfungsian alat tulis juga ditunjang oleh perlengkapan pendukung. Karet penghapus digunakan untuk melakukan koreksi terhadap tulisan atau gambar yang dibuat menggunakan pensil, sedangkan serutan pensil diperlukan untuk menjaga pensil tetap dapat digunakan. Kedua komponen tersebut memiliki fungsi yang terkait langsung dengan penggunaan pensil sehingga penetapannya perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari kesatuan fungsi perlengkapan alat tulis.

Kebutuhan pembelajaran juga dapat mencakup kegiatan membuat garis, melakukan pengukuran sederhana, dan menyusun gambar secara terstruktur. Untuk memenuhi fungsi tersebut, set penggaris dapat dipertimbangkan sebagai perlengkapan penunjang yang digunakan pada aktivitas pembelajaran yang memerlukan pengukuran dan ketelitian dalam menggambar.

Berdasarkan analisis fungsi tersebut, perlengkapan belajar yang dipertimbangkan dalam *School kit* mencakup komponen dengan fungsi yang saling melengkapi, mulai dari penyimpanan dan mobilitas perlengkapan, media pencatatan, alat tulis, hingga perlengkapan penunjang.

Penetapan setiap komponen tetap didasarkan pada kebutuhan yang teridentifikasi pada murid dan tingkat prioritas pemenuhannya, sehingga keberadaan suatu jenis barang dalam kelompok perlengkapan belajar tidak secara otomatis menunjukkan bahwa barang tersebut harus diberikan kepada seluruh penerima dalam jumlah yang sama. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan Matriks Analisis Penentuan Komponen *School kit* pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Matriks Analisis Penentuan Komponen *School kit*

Kategori School kit	Komponen Perlengkapan	Kebutuhan Murid	Dasar Petimbangan	Variasi / Spesifikasi
Pakaian Seragam	Seragam harian putra (atasan putih dan celana biru)	Memenuhi kebutuhan murid untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pakaian yang layak sesuai ketentuan sekolah.	Digunakan sebagai pakaian seragam dalam mengikuti kegiatan sekolah; pemenuhan disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan penerima	Bahan katun/TC (±65:35) atau setara, nyaman digunakan, menyerap keringat, jahitan rapi, warna tidak mudah luntur, ukuran disesuaikan dengan penerima, model sesuai ketentuan sekolah.
	Seragam harian putri (atasan putih dan rok biru)	Memenuhi kebutuhan murid untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pakaian yang layak sesuai ketentuan sekolah.	Digunakan sebagai pakaian seragam dalam mengikuti kegiatan sekolah; pemenuhan disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan penerima	Bahan katun/TC atau setara, nyaman digunakan, rok sesuai ketentuan sekolah, jahitan rapi, warna tidak mudah luntur, ukuran sesuai penerima.

Kategori *School kit*	Komponen Perlengkapan	Kebutuhan Murid	Dasar Petimbangan	Variasi / Spesifikasi
Pakaian Seragam	Seragam Pramuka putra	Memenuhi kebutuhan murid untuk mengikuti kegiatan Pramuka dan kegiatan sekolah yang mewajibkan penggunaan seragam Pramuka.	Digunakan dalam kegiatan sekolah sesuai kebutuhan penggunaan seragam Pramuka	Kemeja cokelat muda dan celana cokelat tua, bahan katun/TC, warna sesuai ketentuan Gerakan Pramuka, ukuran sesuai penerima.
	Seragam Pramuka putri	Memenuhi kebutuhan murid untuk mengikuti kegiatan Pramuka dan kegiatan sekolah yang mewajibkan penggunaan seragam Pramuka.	Digunakan dalam kegiatan sekolah sesuai kebutuhan penggunaan seragam Pramuka	Kemeja cokelat muda dan rok cokelat tua, bahan katun/TC, ukuran sesuai penerima.
Perlengkapan Berpakaian	Sepatu sekolah	Memenuhi kebutuhan murid akan alas kaki yang aman, nyaman, dan sesuai ketentuan sekolah selama mengikuti kegiatan pembelajaran.	Digunakan secara rutin dalam kegiatan di satuan pendidikan dan disesuaikan dengan ukuran penerima	Warna hitam, model sekolah, sol karet anti selip, bahan sintetis/kulit sintetis berkualitas baik, nyaman digunakan, ukuran sesuai penerima.

Kategori *School kit*	Komponen Perlengkapan	Kebutuhan Murid	Dasar Petimbangan	Variasi / Spesifikasi
Perlengkapan Berpakaian	Kaus kaki putih	Memenuhi kebutuhan murid akan kelengkapan berpakaian yang mendukung kenyamanan, kebersihan, dan kerapian selama mengikuti pembelajaran.	Digunakan bersama jenis seragam yang sesuai sebagai perlengkapan individual murid	Bahan katun atau campuran katun yang menyerap keringat, warna putih polos, elastis, ukuran sesuai penerima.
	Kaus kaki hitam	Memenuhi kebutuhan murid akan kelengkapan berpakaian yang mendukung kenyamanan, kebersihan, dan kerapian selama mengikuti pembelajaran.	Digunakan bersama seragam sekolah sebagai perlengkapan individual murid	Bahan katun atau campuran katun, warna hitam polos, elastis, ukuran sesuai penerima.
	Topi sekolah	Melengkapi penggunaan seragam sesuai ketentuan sekolah.	Digunakan sebagai atribut yang melengkapi pakaian seragam sekolah	Model sesuai ketentuan sekolah, bahan kuat namun ringan, warna sesuai ketentuan sekolah, ukuran sesuai penerima.

Kategori *School kit*	Komponen Perlengkapan	Kebutuhan Murid	Dasar Petimbangan	Variasi / Spesifikasi
Perlengkapan Berpakaian	Dasi sekolah	Melengkapi penggunaan seragam sesuai ketentuan sekolah.	Digunakan sebagai atribut yang melengkapi pakaian seragam sekolah	Bahan polyester atau setara, warna dan model sesuai ketentuan sekolah, jahitan rapi.
	Topi Pramuka	Melengkapi penggunaan seragam Pramuka sesuai ketentuan sekolah.	Digunakan sebagai atribut yang melengkapi pakaian seragam Pramuka	Model sesuai ketentuan Gerakan Pramuka, bahan kuat, ukuran sesuai penerima.
	Hasduk/Kacu Pramuka	Melengkapi penggunaan seragam Pramuka sesuai ketentuan sekolah.	Digunakan sebagai bagian dari kelengkapan pakaian seragam Pramuka	Bahan kain berkualitas baik, warna merah putih sesuai ketentuan Gerakan Pramuka, jahitan rapi.
	Ring hasduk Pramuka	Melengkapi penggunaan seragam Pramuka sesuai ketentuan sekolah.	Digunakan untuk menunjang penggunaan kacu Pramuka secara sesuai	Bahan kayu, kulit, atau sintetis yang kuat, ukuran sesuai hasduk.
	Ikat pinggang hitam	Melengkapi penggunaan seragam sesuai ketentuan sekolah.	Digunakan sebagai pelengkap pakaian seragam sesuai kebutuhan penerima	Warna hitam, bahan sintetis/kulit sintetis, gesper logam antikarat, ukuran dapat disesuaikan.

Kategori *School kit*	Komponen Perlengkapan	Kebutuhan Murid	Dasar Petimbangan	Variasi / Spesifikasi
Perlengkapan Belajar	Tas sekolah	Memenuhi kebutuhan murid untuk membawa dan melindungi perlengkapan belajar.	Dapat menampung dan melindungi berbagai perlengkapan belajar dalam satu sarana penyimpanan	Model ransel dua tali, jahitan kuat, memiliki minimal dua kompartemen, mampu memuat buku ukuran A4.
	Pouch alat tulis	Memenuhi kebutuhan murid untuk menyimpan alat tulis agar tertata dan mudah digunakan.	Menyediakan tempat penyimpanan khusus agar alat tulis tersimpan dan mudah digunakan	ukuran cukup untuk menyimpan alat tulis dasar
	Buku tulis	Memenuhi kebutuhan murid untuk mencatat materi, mengerjakan tugas, dan mendokumentasikan hasil belajar.	Digunakan secara langsung dan berulang dalam berbagai kegiatan pembelajaran	Ukuran A5 atau setara, isi minimal 38 lembar, kertas tidak mudah tembus tinta, sampul kuat.
	Pensil	Memenuhi kebutuhan murid untuk menulis dan mengerjakan tugas pembelajaran.	Dapat digunakan pada berbagai aktivitas yang memerlukan tulisan atau gambar yang dapat dikoreksi	Pensil HB berkualitas baik, kayu mudah diraut, isi grafit tidak mudah patah.

Kategori *School kit*	Komponen Perlengkapan	Kebutuhan Murid	Dasar Petimbangan	Variasi / Spesifikasi
Perlengkapan Belajar	Bolpoin	Memenuhi kebutuhan murid untuk menulis dalam kegiatan pembelajaran dan evaluasi.	Dapat digunakan untuk berbagai aktivitas tertulis yang memerlukan tulisan permanen	Tinta biru atau hitam, ujung 0,5–0,7 mm, tinta lancar dan tidak mudah bocor.
	Penghapus	Memenuhi kebutuhan murid untuk memperbaiki hasil tulisan sehingga mendukung proses belajar.	Menunjang penggunaan pensil dengan memungkinkan koreksi terhadap hasil tulisan atau gambar	Bahan karet berkualitas baik, tidak merusak kertas, bebas bahan berbahaya.
	Serutan	Memenuhi kebutuhan murid agar pensil tetap dapat digunakan selama pembelajaran.	Menunjang keberfungsian pensil selama digunakan dalam kegiatan belajar	Bahan plastik atau logam, mata pisau tajam dan aman, mudah digunakan.
	Penggaris	Memenuhi kebutuhan murid untuk kegiatan mengukur, menggambar, dan menyelesaikan tugas yang memerlukan ketelitian.	Mendukung aktivitas pembelajaran yang memerlukan pengukuran, ketelitian, dan konstruksi gambar	bahan plastik bening yang kuat, skala ukur tercetak jelas dan tidak mudah hilang.

Setelah jenis perlengkapan yang direkomendasikan diperoleh, volume kebutuhan dihitung berdasarkan jumlah murid terdampak bencana pada masing-masing jenis perlengkapan.

Perhitungan tidak secara otomatis menggunakan jumlah keseluruhan murid terdampak bencana karena kebutuhan setiap murid dapat berbeda sesuai dengan kondisi perlengkapan yang masih dimiliki dan karakteristik penerima. Secara umum, volume kebutuhan dapat dihitung dengan pendekatan:

Volume kebutuhan jenis barang = jumlah murid yang terdampak × kebutuhan per murid

Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh jumlah kebutuhan setiap jenis perlengkapan secara proporsional. Sebagai ilustrasi, apabila suatu komponen dibutuhkan oleh 100 murid terdampak bencana dan kebutuhan ditetapkan sebanyak satu unit per murid, maka volume kebutuhan komponen tersebut adalah 100 unit. Contoh perhitungan tersebut bersifat ilustratif.

3.5 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN *SCHOOL KIT*

Hasil keseluruhan analisis pada bab ini memberikan dasar untuk menyusun kebutuhan *School kit* bagi murid terdampak bencana. Hasil tersebut diperoleh melalui rangkaian analisis yang dimulai dari pemetaan kondisi dan kebutuhan murid, identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, penetapan komponen, hingga perhitungan kebutuhan berdasarkan jumlah dan karakteristik penerima. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menunjukkan jenis perlengkapan yang dapat direkomendasikan, tetapi juga memberikan dasar untuk menentukan jumlah dan variasi kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Berdasarkan rangkaian analisis tersebut, hasil analisis kebutuhan *School kit* sekurang-kurangnya memuat:

1. kebutuhan prioritas murid, yaitu kebutuhan yang berdasarkan hasil analisis perlu dipertimbangkan untuk dipenuhi melalui *School kit*;
2. jenis perlengkapan yang direkomendasikan, yaitu komponen yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan murid dan termasuk dalam ruang lingkup *School kit*;

3. kebutuhan wajar per murid, yaitu jumlah setiap jenis perlengkapan yang secara wajar diperlukan oleh satu orang penerima sesuai fungsi dan karakteristik penggunaannya;

4. variasi kebutuhan, yaitu perbedaan jenis, ukuran, atau karakteristik perlengkapan yang perlu disesuaikan dengan kondisi penerima;

5. jumlah penerima untuk masing-masing jenis perlengkapan, yaitu jumlah murid yang berdasarkan hasil identifikasi membutuhkan komponen tertentu; dan

6. volume keseluruhan kebutuhan, yaitu jumlah kebutuhan setiap komponen yang diperoleh berdasarkan kebutuhan per murid dan jumlah murid terdampak.

Hasil keseluruhan analisis pada bab ini memberikan dasar untuk menyusun kebutuhan *School kit* bagi murid terdampak bencana. Hasil tersebut diperoleh melalui rangkaian analisis yang dimulai dari pemetaan kondisi dan kebutuhan murid, identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, penetapan komponen, hingga perhitungan kebutuhan berdasarkan jumlah dan karakteristik penerima. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menunjukkan jenis perlengkapan yang dapat direkomendasikan, tetapi juga memberikan dasar untuk menentukan jumlah dan variasi kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komposisi *School kit* tidak harus diperlakukan sebagai paket yang identik bagi seluruh penerima. Beberapa komponen dapat dibutuhkan oleh sebagian besar murid, sedangkan komponen lainnya hanya diperlukan oleh murid dengan kondisi atau karakteristik tertentu. Untuk komponen seperti pakaian seragam dan sepatu, misalnya, kebutuhan juga perlu dibedakan berdasarkan jenis dan ukuran agar barang yang disediakan sesuai dengan penerima.

Hasil analisis kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan desain bantuan dan analisis kebutuhan anggaran pada BAB IV. Pada tahap tersebut, komponen dan volume kebutuhan yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan murid dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketersediaan barang, kewajaran harga, pagu bantuan, serta aspek pelaksanaannya. Dengan demikian, rancangan bantuan yang disusun tidak hanya sesuai dengan kebutuhan penerima, tetapi juga layak untuk dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, jenis, jumlah, dan variasi komponen *School kit* yang direkomendasikan merupakan hasil dari proses analisis kebutuhan murid terdampak bencana. Pendekatan ini memastikan bahwa *School kit* tidak diposisikan sebagai paket perlengkapan yang ditetapkan secara seragam sejak awal, melainkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi penerima dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam desain bantuan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.



ANALISIS DESAIN BANTUAN *School kit*

Bab 4

Hasil analisis kebutuhan pada Bab III menunjukkan bahwa kebutuhan murid terdampak bencana tidak bersifat seragam. Perbedaan tingkat kehilangan perlengkapan belajar, kondisi sosial ekonomi keluarga, karakteristik satuan pendidikan, serta variasi dampak bencana menyebabkan desain bantuan *School kit* tidak dapat disusun hanya berdasarkan pendekatan paket bantuan yang sama untuk seluruh penerima. Oleh karena itu, analisis desain bantuan dilakukan untuk menghasilkan rancangan bantuan yang mampu menjamin kesesuaian antara kebutuhan murid, jenis perlengkapan yang diberikan, mekanisme distribusi, serta efektivitas pelaksanaan bantuan. Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan desain *School kit* yang berbasis kebutuhan (*needs-based*), tepat sasaran, efisien, akuntabel, dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan pascabencana.

4.1 ANALISIS DESAIN BANTUAN

Desain Bantuan Sosial Pascabencana jenis *School kit* merupakan hasil sintesis dari analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Berbeda dengan pendekatan paket bantuan yang telah ditentukan sejak awal, desain bantuan dalam kajian ini disusun berdasarkan kebutuhan aktual murid yang terdampak bencana. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *needs assessment*, yaitu menempatkan kebutuhan penerima manfaat sebagai dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang akan diberikan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlengkapan yang hilang atau rusak akibat bencana tidak selalu sama pada setiap murid. Sebagian murid kehilangan seluruh perlengkapan belajar, sementara sebagian lainnya hanya kehilangan komponen tertentu. Selain itu, terdapat perbedaan kebutuhan berdasarkan karakteristik sekolah, wilayah terdampak, serta tingkat kerusakan yang dialami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain *School kit* perlu disusun secara fleksibel dengan tetap mempertahankan standar minimal perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, desain *School kit* disusun dengan mengelompokkan komponen bantuan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu pakaian seragam, perlengkapan berpakaian, dan perlengkapan belajar. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan fungsi setiap komponen dalam mendukung kesiapan murid untuk kembali mengikuti pembelajaran.

Komponen pakaian seragam diposisikan sebagai kebutuhan dasar karena berkaitan langsung dengan kesiapan murid untuk kembali hadir di sekolah. Komponen perlengkapan berpakaian berfungsi melengkapi penggunaan seragam sehingga murid dapat mengikuti kegiatan belajar sesuai ketentuan sekolah. Adapun perlengkapan belajar merupakan komponen yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran sehingga keberadaannya menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas belajar sehari-hari.

Penyusunan desain bantuan selanjutnya tidak hanya mempertimbangkan jenis komponen yang akan diberikan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas desain bantuan secara keseluruhan. Analisis dilakukan untuk memastikan bahwa desain *School kit* mampu memenuhi kebutuhan murid secara tepat, mudah dilaksanakan, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, analisis desain menggunakan beberapa kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Analisis Desain Bantuan

Kriteria	Pertimbangan
Ketepatan kebutuhan	Kemampuan desain memenuhi kebutuhan aktual murid
Ketepatan sasaran	Kemampuan bantuan menjangkau murid yang terdampak
Efisiensi	Kesesuaian antara kebutuhan, volume, dan sumber daya
Implementabilitas	Kemudahan penyediaan dan distribusi
Akuntabilitas	Kemudahan memastikan bantuan diterima sesuai peruntukan

Hasil analisis menjadi dasar dalam menentukan bentuk *School kit* yang paling sesuai, termasuk apakah seluruh penerima memperoleh komposisi yang sama atau diperlukan variasi berdasarkan karakteristik kebutuhan.

4.2 ANALISIS RISIKO DAN MITIGASI

Pelaksanaan Bantuan Sosial Pascabencana jenis *School kit* tidak terlepas dari berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan. Risiko tersebut dapat muncul sejak tahap identifikasi kebutuhan dan penyusunan desain bantuan kepada murid sebagai penerima manfaat. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, risiko tersebut berpotensi mengurangi ketepatan sasaran bantuan, menurunkan kualitas pelaksanaan, serta mengurangi kebermanfaatan *School kit* dalam mendukung pemulihan layanan pendidikan.

Oleh karena itu, identifikasi risiko dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan desain bantuan. Analisis risiko bertujuan untuk mengenali potensi kendala yang mungkin terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan sehingga langkah-langkah pengendalian dapat direncanakan sejak awal. Dengan demikian, mitigasi tidak hanya dilakukan ketika permasalahan telah terjadi, tetapi telah menjadi bagian dari proses perencanaan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tahapan penyelenggaraan Bantuan Sosial Pascabencana jenis *School kit*, terdapat beberapa risiko utama beserta dampak yang mungkin ditimbulkan dan alternatif mitigasi yang dapat dilakukan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Analisis Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data kebutuhan tidak akurat	Jenis/volume bantuan tidak sesuai	Verifikasi kebutuhan penerima
Penerima tidak sesuai kebutuhan	Bantuan tidak tepat sasaran	Penggunaan data penerima berbasis kebutuhan
Jenis barang tidak sesuai	Barang kurang bermanfaat	Penetapan barang berdasarkan hasil analisis kebutuhan

Risiko	Dampak	Mitigasi
Volume berlebih atau kurang	Inefisiensi/kebutuhan tidak terpenuhi	Penghitungan volume per jenis kebutuhan
Karakteristik barang tidak sesuai	Barang tidak dapat dimanfaatkan optimal	Identifikasi kebutuhan spesifik

Hasil analisis pada Tabel 4.2. menunjukkan bahwa sebagian besar risiko pelaksanaan *School kit* berawal dari kualitas data kebutuhan yang digunakan sebagai dasar penyusunan desain bantuan. Ketepatan data hasil identifikasi kebutuhan menjadi faktor yang sangat menentukan karena seluruh tahapan berikutnya, mulai dari penetapan komponen bantuan juga perhitungan volume bergantung pada informasi tersebut. Semakin baik kualitas data yang diperoleh pada tahap awal, semakin kecil kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bantuan.

Selain kualitas data, kesesuaian antara komponen bantuan dengan kebutuhan murid juga menjadi faktor penting dalam menentukan kebermanfaatan *School kit*. Komponen yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima, baik dari aspek jenis, jumlah, maupun karakteristik barang, berpotensi mengurangi efektivitas bantuan karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, hasil analisis kebutuhan perlu menjadi dasar utama dalam menentukan spesifikasi dan komposisi bantuan yang akan disalurkan.

Secara keseluruhan, hasil analisis risiko menunjukkan bahwa keberhasilan Bantuan Sosial Pascabencana jenis *School kit* sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antara kualitas data kebutuhan dan ketepatan penyusunan desain bantuan. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi pada setiap tahapan tersebut, potensi risiko pelaksanaan dapat diminimalkan sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu mendukung pemulihan layanan pendidikan bagi murid terdampak bencana.

4.3 HASIL ANALISIS DESAIN *SCHOOL KIT*

Berdasarkan analisis kebutuhan dan alternatif desain, rancangan *School kit* perlu memenuhi beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. berbasis kebutuhan murid, sehingga jenis bantuan ditentukan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi;
2. adaptif terhadap variasi kebutuhan, sehingga tidak seluruh penerima harus memperoleh barang yang sama apabila kebutuhannya berbeda;
3. efisien, dengan volume dan anggaran dihitung berdasarkan kebutuhan yang wajar;
4. terukur, karena penerima, jenis barang, volume, dan kebutuhan anggaran dapat ditelusuri; serta
5. berorientasi pada penerima manfaat, dengan memastikan bantuan sampai kepada murid sesuai kebutuhannya.

Hasil BAB III dan BAB IV selanjutnya menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan *School kit* pada BAB V, yang mencakup penerima manfaat, jenis perlengkapan yang direkomendasikan, kebutuhan per penerima, volume, estimasi anggaran, serta desain distribusi.



PENUTUP

Bab 5

5.1 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan desain Bantuan Sosial Pascabencana jenis *School kit*, pemenuhan kebutuhan perlengkapan murid sebaiknya mengacu pada komponen *School kit* yang telah ditetapkan pada Tabel 3.4 sebagai acuan dasar dalam penyusunan bantuan. Tabel tersebut merupakan hasil sintesis dari analisis kebutuhan yang mempertimbangkan relevansi setiap komponen terhadap keberlangsungan pembelajaran murid terdampak bencana, sehingga dapat digunakan sebagai referensi utama dalam perencanaan bantuan.

Namun demikian, penerapan komponen *School kit* tidak bersifat mutlak atau seragam untuk seluruh wilayah terdampak. Jenis, jumlah, maupun spesifikasi perlengkapan perlu disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan di daerah terdampak yang mempertimbangkan karakteristik bencana, tingkat kerusakan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi geografis, ketersediaan barang di daerah, serta kebutuhan aktual murid. Dengan pendekatan tersebut, bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran, proporsional, dan memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung pemulihan layanan pendidikan.

Dengan demikian, Tabel 3.4 berfungsi sebagai standar acuan (*baseline*) komponen *School kit*, sedangkan implementasinya di lapangan tetap mengedepankan prinsip berbasis kebutuhan (*needs-based*), relevansi, proporsionalitas, dan orientasi pada penerima manfaat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial Pascabencana sehingga benar-benar mendukung murid untuk kembali mengikuti proses pembelajaran secara aman, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi daerah terdampak bencana.



Bab 6

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Akkari, A., & Radhouane, M. (2023). *Learning in emergencies contexts: From the building of the concept to multifaced actions in the field. Prospects*, 53(1), 15–28.

Akram, O., Chakma, J., & Mahbub, A. (2012). *Continuing education in disaster-affected schools in Bangladesh: An evaluation of the Education in Emergencies Project. Children Youth and Environments*, 22(2), 249–262.

Evans, D. K., & Ngatia, M. (2021). *School uniforms, short-run participation, and long-run outcomes: Evidence from Kenya. The World Bank Economic Review,* 35(3), 705–719.

Fakhrurrozi, H., & Dimyathi, M. A. (2025). *Humanizing the Classroom: Humanistic Education for Post-Disaster Learning Recovery in Madrasah of Central Sulawesi. Paedagogia*: Jurnal Pendidikan, 14(1), 113–126. https://doi.org/10.24239/pdg.Vol14.Iss1.991

Lai, B., Esnard, A., Wyczalkowski, C., Savage, R., & Shah, H. (2019). *Trajectories of school recovery after a natural disaster: Risk and protective factors. Risk, Hazards, & Crisis in Public Policy*, 10 (1), 32--51.

Lassa, J., Petal, M., & Surjan, A. (2023). *Understanding the impacts of floods on learning quality, school facilities, and educational recovery in Indonesia. Disasters*, 47(2), 412–436.

Ng, G. T., & Sim, T. (2015). *Post-disaster school relocation: A case study of Chinese students' adjustment after the Wenchuan earthquake. International Social Work*, 58(1), 7–22. https://doi.org/10.1177/0020872812456051

Opabola, E. A., Galasso, C., Rossetto, T., Meilianda, E., Idris, Y., & Nurdin, S. (2023). *Investing in disaster preparedness and effective recovery of school physical infrastructure. International Journal of Disaster Risk Reduction*, 90, 103623. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103623

Rendra, M., & Nurdin, A. (2025). *School after disaster: A strategy for post-disaster educational recovery. E3S Web of Conferences*, 677, 09002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202567709002

DAFTAR PUSTAKA

Rendra, M., & Nurdin, A. (2025). *School after disaster: A strategy for post-disaster educational recovery. E3S Web of Conferences*, 677, 09002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202567709002

Wheeler, M., & Donovan, F. (2022). *Utilizing teachers to enhance student recovery through emergency educational programming: A case study analysis of Hurricane Maria. Journal of Emergency Management* (*Weston, Mass.*), 20(6), 561–580.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828.

LAMPIRAN 1 : Format Data Satuan Pendidikan Dan Murid Terdampak Bencana

Tujuan: Memberikan gambaran basis data satuan pendidikan dan murid yang menjadi cakupan analisis kebutuhan *School kit*.

A. Data Satuan Pendidikan

Nama Satuan Pendidikan :
NPSN :
Kab/Kota :
Provinsi :
Jumlah Murid Terdampak :
Jumlah Murid di Dapodik :
Kondisi/Dampak Bencana :
Dokumentasi :

Provinsi	Jumlah Sekolah Terdampak	Jumlah Murid di Dapodik	Jumlah Murid Terdampak
TOTAL			

Sumber Data : Dapodik
Tanggal Pemutakhiran Data : _____

Catatan: Data yang dicantumkan merupakan data yang digunakan sebagai basis analisis dan disesuaikan dengan ketersediaan serta hasil verifikasi data.

LAMPIRAN 2 : Format Identifikasi Kebutuhan Murid Terdampak Bencana

Tujuan: Mengidentifikasi kebutuhan individual murid sebelum menentukan jenis perlengkapan yang akan direkomendasikan sebagai *School kit*.

A. Identitas Satuan Pendidikan

Informasi	Keterangan
Nama Satuan Pendidikan	
NPSN	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Jumlah Murid Terdampak	
Tanggal Identifikasi	

B. Identifikasi Kondisi dan Kebutuhan Murid

No.	Kebutuhan terkait Kegiatan Sekolah / Pembelajaran	Kondisi setelah Bencana	Jumlah Murid Terdampak	Tingkat Kebutuhan *)	Keterangan
1		□ Tidak tersedia □ Rusak □ Masih dapat digunakan			
2		□ Tidak tersedia □ Rusak □ Masih dapat digunakan			

No.	Kebutuhan terkait Kegiatan Sekolah / Pembelajaran	Kondisi setelah Bencana	Jumlah Murid Terdampak	Tingkat Kebutuhan *)	Keterangan
3		□ Tidak tersedia □ Rusak □ Masih dapat digunakan			
4		□ Tidak tersedia □ Rusak □ Masih dapat digunakan			
5		□ Tidak tersedia □ Rusak □ Masih dapat digunakan			
6		□ Tidak tersedia □ Rusak □ Masih dapat digunakan			
7		□ Tidak tersedia □ Rusak □ Masih dapat digunakan			
8		□ Tidak tersedia □ Rusak □ Masih dapat digunakan			

***Tingkat kebutuhan:** Tinggi = diperlukan segera; Sedang = diperlukan tetapi tidak bersifat segera; Rendah = bersifat pendukung.

Catatan Kondisi Khusus:

LAMPIRAN 3 : Matriks Analisis Dan Prioritas Kebutuhan *School kit*

Tujuan: Menentukan kebutuhan yang layak dipenuhi melalui *School kit* berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan murid.

A. Identitas Satuan Pendidikan

No.	Kebutuhan Teridentifikasi	Alternatif Pemenuhan	Relevansi	Urgensi	Kesenjangan Kebutuhan	Kebermanfaatan	Kelayakan melalui *School kit*	Hasil Analisis
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

B. Kriteria Penilaian

Kriteria	Fokus Penilaian
Relevansi	Keterkaitan langsung dengan aktivitas murid dalam mengikuti pembelajaran.
Urgensi	Tingkat kebutuhan untuk segera dipenuhi dalam kondisi pascabencana.
Kesenjangan kebutuhan	Tingkat ketidaktersediaan atau ketidakmemadaian kebutuhan setelah bencana.
Kebermanfaatan	Manfaat langsung bagi murid penerima.
Kelayakan	Ketepatan kebutuhan tersebut untuk dipenuhi melalui *School kit*.

C. Kesimpulan Analisis Prioritas

No.	Kebutuhan	Alternatif Perlengkapan	Kategori Prioritas	Keputusan
1				
2				
3				
dst				

Alasan/Catatan Analisis:

LAMPIRAN 4 : Matriks Hasil Analisis Kebutuhan Dan Volume *School kit*

Tujuan: Menetapkan jenis perlengkapan yang direkomendasikan dan menghitung volume kebutuhan berdasarkan penerima manfaat.

A. Hasil Rekomendasi Jenis Perlengkapan

No.	Kebutuhan yang Dipenuhi	Jenis Perlengkapan yang Direkomendasikan	Fungsi/ Manfaat	Kebutuhan Wajar per Murid	Variasi Kebutuhan *)
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

*) Variasi kebutuhan diisi apabila jenis barang memerlukan perbedaan karakteristik sesuai kebutuhan penerima.

B. Penghitungan Volume

No.	Jenis Perlengkapan	Satuan	Jumlah Murid yang Terdampak	Kebutuhan per Murid	Total Volume
1					
2					
3					

No.	Jenis Perlengkapan	Satuan	Jumlah Murid yang Terdampak	Kebutuhan per Murid	Total Volume
4					
5					
dst					

Formula: Total Volume = Jumlah Murid yang Terdampak × Kebutuhan per Murid

C. Rekapitulasi Hasil Analisis

Jumlah jenis perlengkapan yang direkomendasikan : ..... jenis

Jumlah penerima manfaat : ..... murid

Catatan variasi kebutuhan:_____

LAMPIRAN 5 : Analisis Harga Dan Estimasi Kebutuhan Anggaran *School kit*

Tujuan: Menghitung estimasi kebutuhan anggaran berdasarkan jenis dan volume perlengkapan yang telah direkomendasikan.

A. Analisis Harga Wajar

Sumber data harga :

.....

Tanggal survei/pengambilan data :

.....

No.	Jenis Perlengkapan	Satuan	Volume	Harga Wajar Satuan	Estimasi Kebutuhan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	TOTAL				**Rp .....**

Formula: Estimasi Kebutuhan per Jenis = Volume × Harga Wajar Satuan

C. Ringkasan Hasil Analisis Anggaran

Uraian	Hasil
Jumlah penerima manfaat	
Jumlah jenis perlengkapan yang direkomendasikan	
Estimasi kebutuhan anggaran	
Estimasi kebutuhan rata-rata per penerima*	

*Digunakan sebagai informasi analitis dan bukan otomatis menjadi besaran bantuan per murid.

Kemendikdasmen

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
2026